



RELEVAN

Jurnal Riset Akuntansi

Vol : 3 No : 1 Periode November - April 2022

Indra Satria, Cotoro Mukri, Achmad Djamil

Kinerja Arus Kas Perusahaan Sektor Transportasi dalam Masa Pengendalian Pandemi Covid-19

Rena Zahira, Zumratul Meini

Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor, Aktivitas Persediaan, dan Pandemi Covid-19 Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)

Dian Oktaviani, Ludwina Harahap

Analisis Pengendalian Internal Terhadap Piutang *Lease*: Studi Kasus Pada Perusahaan Pembiayaan PT. FIF

Mira Munira, Shinta Budi Astuti, Ameilia Damayanti

Analisis Kinerja Perbankan Syariah, di Indonesia Menggunakan Konsep *Shariah Maqashid Index*

Muhammad Yusuf, Nita Gustiana

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pemerintah Pusat dengan Rekomendasi Audit sebagai Variabel Moderasi

RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi

PENANGGUNG JAWAB:

Iha Haryani Hatta

KETUA EDITOR:

Mira Munira

DEWAN EDITOR:

Lailah Fujianti

Tryas Chasbiandani

Rafrini Amyulianthy

Gunawan Baharuddin

Eka Sudarmadji Indah

Masri

Nuruddin Subhan

Shinta Budi Astuti

Ameilia Damayanti

MITRA BESTARI:

A. Faroby Falatehan

Harnovinsah

Sigid Eko Pramono

Rida Perwita Sari

Rianto

Halim Dedy Perdana

ADMINISTRASI:

Farah Rahmawati Umairoh

PENERBIT

Universitas Pancasila

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Telepon: (021) 7873711 / (021) 7270133

Email: relevan@univpancasila.ac.id

Website: <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/RELEVAN>

DAFTAR ISI

Volume 3 Nomor 1 November 2022

Kinerja Arus Kas Perusahaan Sektor Transportasi dalam Masa Pengendalian Pandemi Covid-19

Indra Satria, Cotoro Mukri, Achmad Djamil 1 – 15

Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor, Aktivitas Persediaan, Dan Pandemi Covid-19 Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)

Rena Zahirah dan Zumratul Meini 16 – 27

Analisis Pengendalian Internal Terhadap Piutang *Lease*: Studi Kasus Pada Perusahaan Pembiayaan PT. FIF

Dian Oktaviani, Ludwina Harahap 28 – 40

Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Konsep *Shariah Maqashid Index*

Mira Munira, Shinta Budi Astuti, Ameilia Damayanti 41 – 55

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pemerintah Pusat dengan Rekomendasi Audit Sebagai Variabel Moderasi

Muhammad Yusuf, Nita Gustiana 56 – 64

KINERJA ARUS KAS PERUSAHAAN SUBSEKTOR TRANSPORTASI DALAM MASA PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19

Indra Satria^{1*}, Cotoro Mukri², Achmad Djamil³

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia.

^{2,3} Program Studi Manajemen, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia.

*Email: indra_satria_feup@yahoo.co.id.

Diterima 21 September 2022, Disetujui 01 November 2022

Abstrak

Sektor transportasi Indonesia mengalami kondisi yang paling terpuruk selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2020. Seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian melalui kebijakan pengendalian pandemi Covid-19 di tahun 2021, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan subsektor transportasi dalam masa pengendalian pandemi Covid-19 tersebut. Penilaian kinerja dilakukan menurut metode analisis rasio arus kas. *Purposive sampling method* ditetapkan dalam menentukan perusahaan-perusahaan yang terpilih untuk diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja arus kas perusahaan subsektor transportasi mengalami peningkatan dalam hal likuiditas dan solvabilitas. Namun sebaliknya, tingkat efisiensi mengalami penurunan.

Kata kunci: Kinerja Arus Kas

Abstract

The Indonesian transportation sector experienced the worst conditions during the Covid-19 pandemic in 2020. As economic conditions recovered through the Covid-19 pandemic control policy in 2021, this research was conducted to evaluate the performance of transportation sub-sector companies during the Covid-19 pandemic control period. the. Performance appraisal is carried out according to the cash flow ratio analysis method. Purposive sampling method is determined in determining the selected companies for research. The results showed that the cash flow performance of the transportation subsector companies experienced an increase in terms of liquidity and solvency. But on the contrary, the level of efficiency has decreased.

Keywords: Cash Flow Performance

2019, dimana perusahaan mampu membukukan laba bersih Rp 269, 49 miliar.

PT Pelayaran Nasional Indonesia dan Entitas Anak membukukan laba bersih pada tahun 2020, yakni sebesar Rp 30,97 miliar. Tetapi kinerja tersebut turun dibandingkan dengan tahun 2019, dimana perusahaan mampu membukukan laba bersih Rp 180, 75 miliar.

PT ADP Indonesia Ferry dan Entitas Anak membukukan laba bersih pada tahun 2020, yakni sebesar Rp 181,15 miliar. Namun kinerja tersebut juga turun dibandingkan dengan tahun 2019, dimana perusahaan mampu membukukan laba bersih Rp 317,11 miliar.

Pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa sektor transportasi berperan sangat penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah berupaya mendorong pemulihan sektor transportasi dengan memberlakukan kebijakan berupa; insentif pajak, restrukturisasi penyelesaian kredit dari bank maupun lembaga pembiayaan, dan subsidi gaji/upah. Selanjutnya, pemerintah juga memperlonggar kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat seiring dengan semakin terkendalinya wabah Covid-19.

Berbagai kebijakan pemerintah tersebut mampu membangkitkan sektor transportasi. Berita Resmi dari Badan Pusat Statistik Indonesia tertanggal 7 Februari 2022, menyatakan bahwa sektor transportasi di tahun 2021 tumbuh sebesar 3,24% (yoy). Namun, pertumbuhan ini hanya terjadi pada subsektor angkutan darat (4,55%), dan subsektor angkutan laut (2,89%).

Dalam menilai pertumbuhan sektor transportasi tersebut, Badan Pusat Statistik Indonesia menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan. PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam periode tertentu.

Mengacu pada data pertumbuhan sektor transportasi sebagaimana yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia tersebut, dapat diartikan bahwa nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor transportasi telah mengalami kenaikan pada tahun 2021. Kenaikan ini mencapai 3,24 persen dibandingkan dengan tahun 2020.

Bagi para analis keuangan, informasi ini memerlukan evaluasi lebih lanjut. Pertanyaan yang muncul dalam pikiran mereka, apakah kenaikan produksi ini diiringi dengan kenaikan laba? Dan apakah laba ini menghasilkan uang kas yang cukup untuk mendanai kegiatan operasional dan membayar kewajibannya?

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja arus kas operasi perusahaan sektor transportasi pada tahun 2021. Pengevaluasian terhadap kinerja kas dipertimbangkan lebih mendesak dibandingkan kinerja laba, pada saat perusahaan mulai pulih kondisinya. Perusahaan yang menghasilkan laba belum tentu memiliki kas yang cukup untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Sebaliknya, perusahaan yang melaporkan kerugian mungkin memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Disamping itu, penekanan terhadap kinerja arus kas operasi dipertimbangkan karena perusahaan harus

menghasilkan arus kas positif dari aktivitas operasinya. Berbeda halnya dengan arus kas investasi dan arus kas pendanaan, dimana arus kas bisa saja positif ataupun negatif. Hal ini bergantung pada strategi investasi dan pendanaan perusahaan.

Kinerja arus kas operasi perusahaan sektor transportasi akan dievaluasi menurut tingkat likuiditas, solvabilitas, dan efisiensinya. Namun demikian, penilaian kinerja arus kas hanya akan dilakukan terhadap perusahaan subsektor angkutan darat dan subsektor angkutan laut. Hal ini mengacu pada laporan BPS yang menyatakan bahwa hanya kedua sektor tersebut yang mengalami pertumbuhan ekonomi pada masa pengendalian pandemi Covid-19 di tahun 2021.

Berdasarkan hal itu, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimanakah kinerja arus kas perusahaan subsektor transportasi dalam masa pandemi Covid-19 di tahun 2020?
2. Bagaimanakah kinerja arus kas perusahaan subsektor transportasi dalam masa pengendalian Covid-19 di tahun 2021?
3. Apakah kinerja arus kas perusahaan subsektor transportasi mengalami perbaikan dalam hal likuiditas, solvabilitas, dan efisiensinya?

Berkenaan dengan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan tingkat likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi perusahaan subsektor transportasi dalam masa pengendalian Covid-19 di tahun 2021. Selain itu, bertujuan pula untuk menambah literasi sehubungan dengan belum adanya

penelitian yang membahas kinerja arus kas perusahaan subsektor transportasi dalam masa tersebut.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi investor, kreditor, dan manajemen perusahaan subsektor transportasi. Bagi investor dan kreditor, pengevaluasian terhadap kinerja arus kas ini dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya, termasuk dividen dan bunga pinjaman. Bagi manajemen perusahaan, dapat berguna untuk menilai kinerja likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi usaha, menentukan kebijakan dividen, mengevaluasi dampak kebijakan investasi dan pendanaan yang dibutuhkan.

KAJIAN TEORI

Pengertian dan Manfaat Laporan Arus Kas

Suatu laporan arus kas memuat tiga informasi aliran kas yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi adalah aliran kas masuk dan kas keluar dari transaksi-transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Arus kas dari aktivitas investasi melibatkan pembelian dan penjualan aset tetap dan aset jangka panjang lainnya, melibatkan juga pembelian dan penjualan sekuritas jangka pendek yang tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan, memberikan pinjaman dan menerima pelunasannya. Arus kas dari aktivitas pendanaan melibatkan perolehan sumberdaya dari pemilik perusahaan dan pembayaran imbalan atas investasi mereka, perolehan sumberdaya dari kreditor dan pembayaran

kembali atas jumlah yang terhutang (Nedles dan Powers, 2012: 540).

Dari ketiga informasi arus kas tersebut, arus kas dari aktivitas operasi merupakan informasi yang paling penting (Weygandt et al., 2015: 647). Arus kas dari aktivitas operasi umumnya dipertimbangkan sebagai ukuran terbaik dalam menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang cukup bagi kelangsungan hidup perusahaan. Mengingat pentingnya informasi arus kas operasi dalam mengukur kinerja perusahaan, mendorong manajer untuk melebihi sajikan informasi arus kas ini (Nedles dan Powers, 2012: 541).

Libby et al. (2011:637) mengingatkan bahwa laba bersih adalah penting, tapi arus kas juga menentukan keberhasilan perusahaan. Arus kas memungkinkan suatu perusahaan untuk mendanai operasionalnya, mengganti aset yang usang, mengambil tantangan atas peluang investasi baru. Laporan arus kas menitikberatkan perhatian akan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, pengelolaan aset lancar dan kewajiban lancar, kegiatan rinci investasinya, dan pendanaan dari pihak luar.

Alexander dan Nobes (2010:250) mengungkapkan pendapatnya mengenai keunggulan laporan arus kas dibandingkan laporan laba rugi komprehensif. Ia menyatakan bahwa laporan arus kas diperlukan karena informasi kecukupan likuiditas dan ketersediaan kas merupakan hal penting bagi kesuksesan operasi suatu entitas bisnis. Laporan laba rugi komprehensif dan posisi keuangan tidak menyediakan informasi ini

karena prinsip akrual dalam akuntansi hanya fokus terhadap pendapatan dan beban.

Menurut Warren et al. (2018:767), laporan arus kas berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari kegiatan operasi, mendanai kegiatan operasi, memenuhi kewajiban finansial, dan membayar dividen.

Fraser dan Ormiston (2010:119) menyatakan pula pendapatnya tentang manfaat laporan arus kas. Mereka berpendapat bahwa laporan arus kas merupakan alat analisis yang penting bagi investor, kreditor dan pengguna lainnya untuk menilai kemampuan perusahaan dalam hal; menghasilkan kas dimasa mendatang, membayar kewajiban secara tunai, kebutuhan pendanaan eksternal di masa depan, keberhasilannya dalam mengelola aktivitas investasi secara produktif, dan efektivitasnya dalam menerapkan strategi pembiayaan dan investasi.

Jenis Rasio Arus Kas

Beberapa rasio keuangan telah dikembangkan oleh para ahli dalam menganalisis laporan arus kas. Rasio arus kas tersebut diantaranya meliputi; rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio efisiensi. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya. Rasio efisiensi yang juga dikenal sebagai rasio aktivitas ataupun rasio perputaran, digunakan untuk mengukur

seberapa efektifnya perusahaan menggunakan berbagai asetnya (Kramer dan Johnson, 2009: 217).

a. Rasio Likuiditas

1) Operating Cash Flow to Current Liabilities Ratio.

Menurut Wahlen et al. (2011:376), *Operating Cash Flow to Current Liabilities Ratio*, digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek melalui kas dari kegiatan operasi yang dihasilkannya. Rasio ini ditentukan dengan membandingkan antara kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi terhadap liabilitas lancar, dengan formula seperti berikut ini;

$$\text{OCF to CL} = \frac{\text{Cash Flow from Operations}}{\text{Current Liabilities}}$$

2) Operating Cash Flow to Cash Dividend Ratio

Menurut Gibson (2011:382), *Operating Cash Flow to Cash Dividend Ratio* digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari kegiatan operasi untuk membayar dividen. Rasio ini ditentukan dengan membandingkan antara kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi terhadap dividen tunai, dengan formula seperti berikut ini;

$$\text{OCF to CD} = \frac{\text{Operating Cash Flow}}{\text{Cash Dividend}}$$

3) Cash flow yield

Menurut Needles dan Powers (2011:217), *Cash flow yield* digunakan untuk mengukur seberapa banyak uang kas yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan laba bersih yang dihasilkannya. Rasio ini ditentukan dengan membandingkan antara kas yang

dihasilkan dari kegiatan operasi terhadap laba bersih, dengan formula seperti berikut ini;

$$\text{Cash flow yield} = \frac{\text{Cash Flow from Operations}}{\text{Net Income}}$$

4) Cash flow Liquidity Ratio.

Rasio ini digunakan untuk mengukur ketersediaan aset yang sangat likuid untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan (Fraser dan Ormiston, 2010:189). Rasio ini ditentukan dengan membandingkan antara jumlah kas, surat-surat berharga jangka pendek, dan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi terhadap total liabilitas lancar, seperti formula berikut ini;

$$\text{CFL} = \frac{(\text{Cash} + \text{Marketable Securities} + \text{Cash Flow from Operations})}{\text{Current Liabilities}}$$

b. Rasio Solvabilitas

1) Operating Cash Flow to Total Liabilities Ratio

Menurut Wahlen et al. (2011:376), *Operating Cash Flow to Total Liabilities Ratio* digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya melalui kas dari kegiatan operasi yang dihasilkannya. Rasio ini ditentukan dengan membandingkan antara kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi terhadap total liabilitas, dengan formula seperti berikut ini;

$$\text{OCF to CL} = \frac{\text{Cash Flow from Operations}}{\text{Total Liabilities}}$$

2) Interest Coverage Ratio

Interest Coverage Ratio digunakan untuk mengukur berapa kali pembayaran bunga dapat ditopang oleh arus kas operasi yang dihasilkan perusahaan (Wahlen et al., 2011: 373; Fraser dan Ormiston, 2010:195). Rasio ini ditentukan

dengan membandingkan antara arus kas dari aktivitas operasi (sebelum bunga dan pajak) terhadap pembayaran bunga, dengan formula seperti berikut ini;

$$\text{ICR} = (\text{CFO} + \text{Payment for Interest and Income Taxes}) / \text{Cash Payment for Interest}$$

3) Cash Flow from Operations to Capital Expenditures Ratio

Porter dan Norton (2015:688) menyatakan bahwa *Cash Flow from Operations to Capital Expenditures Ratio*, digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk mendanai perolehan aset produktif. Aset produktif adalah aset yang dimiliki untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti, investasi dalam saham dan obligasi, kepemilikan real estate, yang bukan merupakan kegiatan bisnis inti perusahaan. Rasio ini ditentukan dengan membandingkan antara kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi setelah dikurangi pembayaran dividen terhadap pembelian tunai aset produktif, dengan formula seperti berikut ini;

$$\text{CFO to CE} = (\text{Cash Flow from Operations} - \text{Total Dividends Paid}) / \text{Cash Paid for Acquisition}$$

c. Rasio efisiensi

1) Cash Flow Margin

Menurut Fraser dan Ormiston (2010:198), *Cash Flow Margin* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengkonversikan penjualannya menjadi kas. Rasio ini ditentukan dengan membandingkan antara kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi terhadap penjualan bersih, dengan formula seperti berikut ini;

$$\text{Cash Flow Margin} = \text{Cash Flow from Operations} / \text{Net Sales}$$

2) Cash Return on Assets

Menurut Fraser dan Ormiston (2010:198), *Cash Return on Assets* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari kegiatan operasi dengan aset yang dimilikinya. Rasio ini ditentukan dengan membandingkan antara kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi terhadap total aset, dengan formula seperti berikut ini;

$$\text{Cash Return on Assets} = \text{Cash Flow from Operations} / \text{Total Assets}$$

Penelitian-penelitian terdahulu

Penelitian yang membahas tentang dampak Covid-19 terhadap kinerja perusahaan di Indonesia telah berlangsung dan dipublikasikan secara luas. Namun demikian, belum ada penelitian yang mengkaji kinerja arus kas perusahaan dalam masa pengendalian pandemi Covid-19 di tahun 2021, khususnya sektor transportasi.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan baru sampai pada pengukuran kinerja arus kas perusahaan pada masa pandemi Covid-19, seperti yang dilakukan oleh Siska (2020), dan Rachmawati dan Muhni Pamuji (2021).

Siska (2020) meneliti kinerja arus kas PT Kalbe Farma pada masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan analisis trend. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja arus kas operasi perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 73% walaupun ditengah masa pandemi Covid-19. Kenaikan ini diperoleh melalui naiknya jumlah penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan

meningkatnya permintaan obat dan suplemen.
OK

Rachmawati dan Pamuji (2021) meneliti tentang pengaruh Covid-19 terhadap kinerja perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan analisis rasio arus kas. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja arus kas yang diukur menggunakan rasio likuiditas dan fleksibilitas mengalami penurunan selama pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan turunnya penjualan ekspor akibat pemberlakuan lockdown di negara tujuan dan pasar yang lesu. OK

Disamping penelitian-penelitian tersebut, terdapat juga penelitian yang membahas tentang kinerja perusahaan pada masa pandemi Covid-19, seperti yang dilakukan oleh Siswati (2022), Suci (2022), Esomar (2021), dan Amalia et al. (2021). Namun, penelitian ini membahas kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan konvensional dan berdasarkan analisis deskriptif statistik. Sehingga berbeda dengan penelitian yang dilakukan ini, dalam hal indikator keuangan yang dievaluasi dan juga metode analisisnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif non-statistik dalam mengevaluasi kinerja arus kas perusahaan, seperti yang dilakukan oleh Murtianingsih dan Hastuti (2020), Safitri et.al (2017), Hamidah (2018), Hardiyanti et.al (2022), Kaloh et.al (2018), Agustina (2017), Polii et.al (2019), Afriani et.al (2022). Hanya saja, penilaian kinerja arus kas dari penelitian-penelitian ini dinyatakan

menurut kriteria baik atau buruk dengan mengacu pada standar rasio tertentu untuk masing-masing tahun yang dianalisis. Sementara, penelitian ini melakukan hasil penilaian berdasarkan naiknya atau turunnya rasio keuangan dibandingkan tahun lalu dan kemudian diinterpretasikan penyebab perubahan tersebut.

Penelitian ini akan menilai kinerja arus kas perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021. Untuk itu, data arus kas operasi maupun akun-akun tertentu dalam laporan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan akan digabungkan menjadi satu kesatuan untuk mencerminkan data arus kas maupun akun-akun tertentu dari perusahaan subsektor transportasi secara agregat.

Menurut Purba (2005), transportasi adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan. Berdasarkan definisi ini, maka populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua sektor usaha, yaitu perusahaan sektor transportasi dan perusahaan sektor logistik. Perusahaan sektor transportasi bergerak dalam bidang jasa pengangkutan orang. Sementara, perusahaan sektor logistik bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang.

Perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor transportasi dan sektor logistik yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2020-2021. Jumlah yang terdaftar adalah 26

perusahaan sebagaimana dinyatakan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Perusahaan Subsektor Transportasi

No	Kode	Perusahaan
1	ASSA	PT Adi Sarana Armada
2	BIRD	PT Blue Bird
3	BPTR	PT Batavia Prosperindo Trans
4	CMPP	PT AirAsia Indonesia
5	HELI	PT Jaya Trishindo
6	IATA	PT Indonesia Transport and Infrastructure
7	LRNA	PT Eka Sari Lorena Transport
8	SAVE	PT Steady Save
9	TAXI	PT Express Transindo Utama
10	TRJA	PT Transkon Jaya
11	WEHA	PT Weha Transportasi Indonesia

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2021

Tabel 2. Perusahaan Subsektor Logistik

No	Kode	Perusahaan
1	AKSI	PT Mineral Sumberdaya Mandiri
2	BLTA	PT Berlian Laju Tanker
3	HAIS	PT Hasnur Internasional Shipping
4	JAYA	PT Armada Berjaya Trans
5	KJEN	PT Krida Jaringan Nusantara
6	MIRA	PT Mitra International Resources
7	NELY	PT Pelayaran Nelly Dwi Putri
8	PPGL	PT Prima Globalindo Logistik
9	PURA	PT Putra Rajawali Kencana
10	SAPX	PT Satria Antar Prima
11	SDMU	PT Sidomulyo Selaras
12	SDMR	PT Samudera Indonesia
13	TMAS	PT Temas
14	TNCA	PT Trimuda Nuansa Citra
15	TRUK	PT Guna Timur Raya

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2021

Penentuan sampel dilakukan menurut metode statistik dengan pendekatan *purposive sampling*. Kriteria yang ditetapkan untuk penentuan sampel penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan perusahaan sektor transportasi dan logistik yang bergerak dalam bidang jasa angkutan darat/laut.

- 2) Menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- 3) Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.
- 4) Tersedia akun-akun keuangan yang sesuai untuk menentukan rasio arus kas yang telah ditetapkan.
- 5) Aktivitas usaha inti induk perusahaan bergerak dalam bidang Angkutan Darat/Angkutan Laut dalam hal laporan keuangan disajikan secara konsolidasian.

Berdasarkan kriteria diatas, terdapat 5 perusahaan tidak memenuhi syarat untuk terpilih menjadi sampel yaitu: PT Indonesia Transport and Infrastructure (laporan disajikan dalam mata uang asing), PT AirAsia Indonesia (bergerak dalam bidang angkutan udara), PT Jaya Trishindo (bergerak dalam bidang angkutan udara), PT Samudera Indonesia (laporan disajikan dalam mata uang asing), dan PT Berlian Laju Tanker (laporan disajikan dalam mata uang asing).

Data yang digunakan untuk menilai kinerja arus kas adalah data sekunder berupa laporan arus kas dan posisi keuangan perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diakses melalui situs www.idx.co.id.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah sampel yang memenuhi kriteria untuk diteliti adalah 21 perusahaan yang bergerak dalam bidang angkutan darat dan laut. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan untuk mencerminkan kinerja perusahaan

subsektor transportasi (angkutan darat dan laut) secara agregat dan disajikan dalam nilai jutaan rupiah.

Laporan arus kas dan saldo akun-akun keuangan terpilih yang digunakan untuk

menganalisis kinerja arus kas perusahaan subsektor transportasi secara agregat, disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Laporan Arus Kas Perusahaan Subsektor Transportasi Secara Agregat pada Tahun 2021 dan 2020

	Tahun 2021 Rp (jutaan)	Tahun 2020 Rp (jutaan)	Perubahan 2020-2021 Rp (jutaan)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi:			
Penerimaan kas dari pelanggan	13.813.095	10.792.155	3.020.940
Pembayaran kas kepada pemasok & beban usaha	(8.942.340)	(6.990.933)	(1.951.407)
Pembayaran kepada Direksi & Karyawan	(2.693.849)	(1.768.406)	(925.443)
Pembayaran pajak penghasilan	(197.471)	(199.974)	2.503
Pembayaran bunga	(621.081)	(654.312)	33.231
Arus kas operasi lainnya	41.055	199.803	(158.748)
Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	1.399.409	1.378.333	21.076
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Investasi:			
Penerimaan bunga	14.679	15.289	(610)
Perolehan aset tetap	(1.140.618)	(1.447.898)	307.280
Penjualan (pembelian) portofolio efek - net	(42.413)	2.777	(45.190)
Perolehan aset tidak berwujud	(27.922)	(29.487)	1.565
Pembayaran uang muka	(87.702)	(213.976)	126.274
Hasil penjualan aset tetap	1.166.181	263.727	902.454
Penurunan piutang lain-lain	3.989	11.372	(7.383)
Pembelian saham kepentingan non-pengembali	(206.696)	-	(206.696)
Hasil penjualan aset tidak lancar yg dikuasai untuk dijual	594.137	514.354	79.783
Arus kas investasi lainnya	(7.518)	27.907	(35.425)
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	266.117	(855.935)	1.122.052
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:			
Pembayaran dividen kas	(424.649)	(48.362)	(376.287)
Pembayaran liabilitas sewa	(502.894)	(555.763)	52.869
Penerimaan (pembayaran) pinjaman bank - bersih	(340.841)	587.450	(928.291)
Penerbitan saham	203.530	334.479	(130.949)
Pembayaran utang obligasi	(58.297)	(112.813)	54.516
Penerbitan obligasi konversi	720.000	-	720.000
Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi	(5.992)	(45.448)	39.456
Penurunan (kenaikan) saldo bank yang dibatasi penggunaannya	16.084	(28.460)	44.544
Pembayaran pinjaman nonbank - bersih	(242.475)	(164.734)	(77.741)
Arus kas pendanaan lainnya	37.307	(67.298)	104.605
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	(598.227)	(100.949)	(497.278)

Kenaikan bersih kas dan setara kas	1.067.299	421.449	645.850
Kas dan setara kas awal tahun	1.435.239	1.010.259	424.980
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(3.626)	3.009	(6.635)
Kas dan setara kas akhir tahun	2.498.912	1.434.717	1.064.195

Sumber: data diolah

Tabel 4. Saldo Akun-Akun Terpilih Perusahaan Subsektor Transportasi Secara Agregat pada Tahun 2021 dan 2020

	Tahun 2021 Rp (jutaan)	Tahun 2020 Rp (jutaan)	Perubahan 2020-2021 Rp (jutaan)
Laporan Posisi Keuangan:			
Kas dan setara kas	2.506.584	1.445.654	1.060.930
Surat-surat berharga jangka pendek	18.218	19.409	(1.191)
Jumlah aset tetap - net	15.351.888	15.958.462	(606.574)
Total aset	22.048.951	21.299.690	749.261
Jumlah liabilitas lancar	4.016.292	4.717.350	(701.058)
Jumlah liabilitas tidak lancar	6.440.912	6.499.874	(58.962)
Total liabilitas	10.457.204	11.217.224	(760.020)
Total ekuitas	11.591.747	10.221.300	1.370.447
Laporan Laba (Rugi):			
Pendapatan bersih	14.064.646	10.732.479	3.332.167
Beban bunga	615.714	698.466	(82.752)
Laba (rugi) bersih	1.237.722	(115.195)	1.352.917

Sumber: data diolah

Berdasarkan informasi keuangan tersebut, nilai rasio likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi

perusahaan sektor transportasi secara agregat dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Efisiensi Perusahaan Subsektor Transportasi Secara Agregat pada Tahun 2021 dan 2020

	Tahun 2021	Tahun 2020	Perubahan 2020-2021
Rasio Likuiditas:			
Operating Cash Flow to Current Liabilities Ratio	34,84%	29,22%	5,62%
Cash Flow Liquidity Ratio	97,71%	60,28%	37,43%
Rasio Solvabilitas:			
Operating Cash Flow to Total Liabilities Ratio	13,38%	12,29%	1,09%
Interest Coverage Ratio	357,11%	341,22%	15,90%
Rasio Efisiensi:			
Cash Flow Margin	9,95%	12,84%	-2,89%
Cash Return on Assets	6,35%	6,47%	-0,12%

Sumber: data diolah

1. Tingkat Likuiditas

Operating cash flow to current liabilities ratio naik dari 29,22% pada tahun 2020 menjadi 34,84% pada tahun 2021, atau naik sebesar 5,62%. Kenaikan ini terjadi karena adanya peningkatan dalam jumlah kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, dan diikuti pula dengan penurunan jumlah kewajiban lancar. Jumlah kas dari aktivitas operasi naik sebesar Rp 21.076 juta. Sementara, jumlah kewajiban lancar turun sebesar Rp 701.058 juta. Hal ini berarti bahwa kemampuan perusahaan subsektor transportasi dalam membayar kewajiban lancarnya semakin meningkat.

Cash Flow Liquidity Ratio naik dari 60,28% pada tahun 2020 menjadi 97,71% pada tahun 2021, atau naik sebesar 37,43%. Kenaikan ini terjadi karena jumlah aset yang sangat likuid (kas dan setara kas, surat-surat berharga jangka pendek, dan kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi) mengalami kenaikan. Sementara jumlah kewajiban lancar mengalami penurunan. Jumlah aset yang sangat likuid naik sebesar Rp 1.080.815 juta. Sementara, jumlah kewajiban lancar turun sebesar Rp 701.058 juta. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan subsektor transportasi dalam membayar kewajiban lancar dengan aset sangat likuid yang dimilikinya, semakin baik.

2. Tingkat Solvabilitas

Operating cash flow to total liabilities ratio mengalami kenaikan dari 12,29% pada tahun 2020 menjadi 13,38% pada tahun 2021, atau naik sebesar 1,09%. Kenaikan ini terjadi karena adanya peningkatan dalam jumlah kas yang

dihasilkan dari aktivitas operasi, dan diikuti pula dengan penurunan jumlah kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Jumlah kas dari aktivitas operasi naik sebesar Rp 21.076 juta. Sementara, jumlah kewajiban turun sebesar Rp 760.020 juta. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan subsektor transportasi dalam membayar seluruh kewajibannya semakin meningkat.

Interest coverage ratio juga mengalami kenaikan dari 341,22% pada tahun 2020 menjadi 357,11% pada tahun 2021, atau naik sebesar 15,90%. Hal ini terjadi karena jumlah kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi (sebelum bunga dan pajak) mengalami penurunan. Namun, diikuti dengan penurunan jumlah pembayaran bunga yang jauh lebih tinggi. Jumlah kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi (sebelum bunga dan pajak) turun sebesar Rp 14.658 juta. Sementara, jumlah bunga yang dibayarkan turun sebesar Rp 33.231 juta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan subsektor transportasi dalam membayar bunga pinjaman semakin baik.

3. Tingkat Efisiensi

Kemampuan perusahaan subsektor transportasi dalam mengkonversikan penjualan menjadi kas, semakin rendah. Hal ini terlihat dari penurunan *cash flow margin*. *Cash flow margin* turun dari 12,84% pada tahun 2020 menjadi 9,95% pada tahun 2021, atau turun sebesar 2,89%. Jumlah penjualan naik sebesar Rp 3.332.167 juta, sementara jumlah kas dari aktivitas operasi hanya naik Rp 21.076 juta.

Kemampuan perusahaan subsektor transportasi dalam menghasilkan kas dengan aset yang dimilikinya, juga mengalami penurunan. *Cash Return on Assets* turun dari 6,47% pada tahun 2020 menjadi 6,35% pada tahun 2021, atau turun sebesar 0,12%. Penurunan ini terjadi karena jumlah kas dari aktivitas operasi hanya naik Rp 21.076 juta. Sementara, jumlah aset naik sebesar Rp 749.261 juta.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis *operating cash flow to current liabilities ratio* dan *cash flow liquidity ratio*, tingkat likuiditas perusahaan subsektor transportasi mengalami peningkatan dalam masa pengendalian pandemi Covid-19 di tahun 2021. Artinya, kemampuan perusahaan subsektor transportasi dalam membayar kewajiban lancar, semakin naik.

Berdasarkan hasil analisis *operating cash flow to total liabilities ratio* dan *interest coverage ratio*, tingkat solvabilitas perusahaan subsektor transportasi mengalami perbaikan dalam masa pengendalian pandemi Covid-19 di tahun 2021. Dengan demikian, kemampuan perusahaan subsektor transportasi dalam membayar seluruh kewajiban maupun membayar bunga pinjaman, semakin meningkat.

Berdasarkan hasil analisis *operating cash return on assets* dan *cash flow margin*, tingkat efisiensi perusahaan subsektor transportasi mengalami penurunan dalam masa pengendalian pandemi Covid-19 di tahun 2021. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan

perusahaan subsektor transportasi dalam menghasilkan kas dari aset yang dimiliki maupun kemampuan dalam mengkonversikan penjualan menjadi kas, semakin rendah.

Saran

Hasil penelitian ini kemungkinan belum sepenuhnya mencerminkan kinerja arus kas perusahaan subsektor transportasi. Hal ini mengingat bahwa data yang dianalisis berupa laporan keuangan konsolidasian yang memuat laporan keuangan entitas induk dan anak perusahaan, dimana anak perusahaan mungkin tidak bergerak dalam bidang transportasi.

Berkenaan dengan kelemahan tersebut, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengupayakan hasil analisis yang bersumber dari data perusahaan yang sepenuhnya bergerak di bidang usaha transportasi. Bahkan, penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan analisis kinerja kas yang lebih mendalam dengan melakukan analisis kinerja arus kas atas aktivitas pendanaan dan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Raden Irna et.all. (2022). Laporan Arus Kas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Sektor Pertanian Yang Terdaftar di BEI. Prosiding The 2nd National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET) Universitas Bina Bangsa. Tersedia: View of LAPORAN ARUS KAS UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAFTAR DI BEI (conferences-binabangsa.org), akses 12/11/2022.
- Agustina, Lia. (2017). Analisis Laporan Arus Kas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Gudang Garam Tbk Yang

- Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Sultanist*. Vol. 6(1), 73-79. Tersedia: <https://sultanist.ac.id/index.php/sultanist/article/download/87/87>, akses 12/11/2022.
- Alexander, David dan Christopher Nobes. 2010. *Financial Accounting an International Introduction*. (ed.4). Harlow-England: Prentice Hall.
- Amalia, Chairun et al. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sub Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*. Vol 2 (2), 134-139. Tersedia: <https://journal.al-matani.com/index.php/invest/article/view/182/130> (18 Mei 2022).
- Badan Pusat Statistik. 2022. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021. Berita Resmi Statistik No/14/02/Th.XXV, 7 Februari 2022. Tersedia: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html> (12 Mei 2022).
- Badan Pusat Statistik. 2022. Laporan Perekonomian Indonesia 2021. Tersedia: <https://www.bps.go.id/publication/2021/09/17/f3ece7157064514772b18335/laporan-perekonomian-indonesia-2021.html> (12 Mei 2022).
- Esomar, Maria J.F. (2021). Analisa Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan di Indonesia. *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Ekonomi*. Vol 2(2), 22-29. Tersedia: <https://journal.jis-institute.org/index.php/jbme/article/view/217> (18 Mei 2022).
- Fraser, Lyn M dan Aileen Ormiston. 2010. *Understanding Financial Statements*. (ed.9). New Jersey – USA: Prentice Hall.
- Gibson, Charles H. 2011. *Financial Reporting and Analysis; Using Financial Accounting Information*. (ed.12). Ohio-USA: South Western Cengage Learning.
- Hamidah, Aqnes Dwi Sakti. (2018). Analisis Informasi Laporan Arus Kas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Periode 2014-2016 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*. Vol. 5 (1), 1-9. Tersedia: Analisis Informasi Laporan Arus Kas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt Semen Indonesia (Persero) Tbk Periode 2014-2016 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Sakti Hamidah | *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis* (trunojoyo.ac.id), akses 12/11/2022.
- Hardiyanti et.al. (2022). Analisis Laporan Arus Kas untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Perusahaan Subsektor makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Vol. 5 (1), 4769-4774. Tersedia: View of Analisis Laporan Arus Kas untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (stkipyapisdampu.ac.id), akses 12/11/2022.
- Kaloh, Trisilia et.al. (2018). Analisis Laporan Arus Kas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 13(4), 741-751. Tersedia: Rerensi 10 Kaloh.pdf, akses 12/11/2012.
- Kramer, Bonita K dan Christie W Johnson. 2009. *Financial Statements Demystified; A Self-Teaching Guide*. New York-USA: McGraw Hill.
- Libby, Robert et al. 2011. *Financial Accounting*. (ed.7). New York-USA: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Murtianingsih, Tri dan Hastuti. (2020). Analisis Laporan Arus Kas untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Industri Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar

- Bandung, 26-27 Agustus 2020. Tersedia: <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/2130/1673>, akses 12/11/2022.
- Needles Jr, B.E. dan Marian Powers. 2012. *Financial Accounting*. (ed.11). Ohio-USA: South-Western Cengage Learning.
- Polii, Jueabri Clara et.al. (2019). Analisis Laporan Arus Kas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA*. Vol. 7(3), 4096-4105. Tersedia:24654 (unsrat.ac.id), akses 12/11/2012.
- Porter, Gary A dan Curtis L. Norton. 2015. *Financial Accounting the Impact on Decision Maker*. (Ed.9). Connecticut-USA: Cengage Learning.
- Purba, Hasim. 2005. *Hukum Pengangkutan di Laut*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Rachmawati, Yuni dan Muhni Pamuji. (2021). Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Rasio Arus Kas Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol 16 (2), 1921-214. Tersedia: <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam/index.php/jam/article/view/154/104> (18 Mei 2022).
- Safitri, Rika Hendra et.al. (2017). Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Dasar Pengukuran Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Kasus Pada RSUD di Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*. Vol 5 (2), 125-135. Tersedia: 283-1-1078-1-10-20171227.pdf (unsri.ac.id), akses 12/11/2022.
- Siska, Elmira. (2020). Analisis Arus Kas PT Kalbe Farma Tbk Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol 1(5), 1053-1058. Tersedia: <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1293/1010> (18 Mei 2022).
- Siswati, Ari. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 pada Kinerja Keuangan (Studi kasus pada Perusahaan Teknologi yang Listing di BEI). *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*. Vol 2(1), 64-73. Tersedia: <http://jurnal.unw.ac.id/index.php/jibaku/article/view/1043/690> (18 Mei 2022).
- Suci, Putri Purwaning. (2022). Analisis komparasi kinerja keuangan sebelum dan selama pandemi Covid-19: studi kasus PT. AirAsia Indonesia Tbk. *Proceeding of National Conference on Accounting and Finance*. Vol. 4, 426-432. Tersedia: <https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/22317> (18 Mei 2022).
- Wahlen, James M. et al. 2011. *Financial Reporting, Financial Statement Analysis, and Valuation; A Strategic Perspective*. (ed.7). Ohio-USA: South Western Cengage Learning.
- Warren, Carl S. et al. 2018. *Accounting*. (ed.27). Massachusetts-USA: Cengage Learning.
- Weygandt, Jerry J et al. 2015. *Financial Accounting IFRS Edition*. (ed.3). New Jersey-USA: John Wiley & Sons, Inc.

PENGARUH OPINI AUDIT, PERGANTIAN AUDITOR, AKTIVITAS PERSEDIAAN, DAN PANDEMI COVID-19 TERHADAP AUDIT DELAY (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)

Rena Zahirah ¹, Zumratul Meini ²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

E-mail: zumratul.meini@civitas.unas.ac.id

Diterima 09 November 2022, Disetujui 10 November 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh opini audit, pergantian auditor, aktivitas persediaan, dan pandemi covid 19 terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka jumlah sampel yang digunakan yaitu 32 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 110 perusahaan-tahun. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mempertimbangan kondisi Pandemi COVID-19 sebagai salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan mengalami audit delay dalam pelaporan keuangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap audit delay, pergantian auditor berpengaruh positif terhadap audit delay, aktivitas persediaan berpengaruh negatif terhadap audit delay, dan pandemi covid 19 berpengaruh positif terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2016-2020.

Kata Kunci: Audit Delay, Opini Audit, Pergantian Auditor, Aktivitas Persediaan, Pandemi Covid-19

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence of the effect of audit opinion, auditor turnover, inventory activity, and the covid 19 pandemic on audit delay in manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2020. With predetermined criteria, the number of samples used is 32 companies with a total of 160 company-year observations. This research is novel by considering the COVID-19 pandemic as one of the factors that causes companies to experience audit delays in their financial reporting. The results show that audit opinion has no effect on audit delay, auditor turnover has a positive effect on audit delay, inventory activity has a negative effect on audit delay, and the COVID-19 pandemic has a positive effect on audit delay in manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesian stock exchange. (IDX) 2016-2020 period

Keywords: Audit Delay, Audit Opinion, Auditor Switching, Inventory Activities, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Berkembangnya dunia bisnis yang terjadi di Indonesia berjalan semakin pesat. Munculnya pandemi virus covid-19 yang melanda di berbagai seluruh dunia salah satunya Indonesia, memberi dampak pada dunia bisnis pada hampir seluruh sektor. Namun, pasar modal di Indonesia kenyataannya tetap mengalami pertumbuhan yang positif. Oleh karena itu, meskipun adanya virus covid-19 yang sedang melanda, pasar modal tetap menjadi pilihan bagi masyarakat untuk dapat berinvestasi. Hal tersebut membuat perusahaan dapat lebih meningkatkan laporan keuangan di setiap tahunnya serta dapat berdasarkan dengan ketentuan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang sudah ditetapkan oleh IAPI yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia. Dengan demikian, laporan keuangan merupakan faktor penting sebagai bahan acuan investor dalam memutuskan untuk mentidaklanjuti investasi di perusahaan tersebut.

Hal yang sangat diutamakan dalam menyajikan suatu laporan keuangan adalah tepat waktu. Dalam menyajikan suatu laporan keuangan secara tepat waktu akan berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengambil sebuah keputusan. Namun, jika tidak tepat waktu dalam menyajikan suatu laporan keuangan, maka dapat dinyatakan laporan keuangan menjadi tidak relevan. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas audit tersebut, auditor harus bekerja secara efisien dan akurat tanpa mengabaikan keandalan suatu informasi perusahaan yang disajikan melalui laporan keuangan. Hal

tersebut membuat auditor dituntut untuk tidak menunda menyampaikan laporan keuangannya, walaupun pada kenyataannya membutuhkan proses yang lebih lama (Abdillah *et al.*, 2019). Disampaikannya suatu laporan keuangan dengan tepat waktu untuk mengantisipasi adanya kemungkinan terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah penyampaian suatu informasi yang tidak serupa kepada pihak mana pun atau hanya salah satu pihak yang hanya diberikan informasi secara detail.

Munculnya pandemi covid-19, membuat pemerintah melakukan kebijakan untuk membatasi aktivitas diluar rumah. Terdapat aktivitas-aktivitas yang ditutup dan dialihkan melalui jarak jauh atau online, seperti sekolah dan kantor untuk menghindari adanya kontak antar manusia. Pandemi virus covid-19 menjadi tantangan baru bagi auditor untuk dapat menerapkan strategi dan upaya dalam menyelesaikan tugas auditnya dan waktu yang akan semakin lama dalam melakukan proses audit. Pandemi ini mempengaruhi auditor untuk menyelesaikan tugasnya dalam mengaudit suatu laporan keuangan seperti interaksi terhadap klien yang semula dilakukan secara tatap muka kini menjadi daring (*online*) serta pada pencarian bukti audit dalam perusahaan. Dengan demikian, auditor dapat menunda dalam menyelesaikan auditnya yang semakin lebih lama.

Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya atau dapat dikatakan dengan *audit delay* pada periode 2018-2019 yaitu PT. Tiga Pilar Indonesia Tbk yang mengakibatkan

perdagangan efeknya di suspensi sejak tanggal 5 Juli 2018 dan denda sebesar Rp.150.000.000. Terlambatnya PT. Tiga Pilar Indonesia Tbk dalam menyampaikan laporan keuangannya dikarenakan adanya kendala transisi dari manajemen lama ke manajemen baru, kasus tersebut diakses oleh peneliti melalui laman www.cnbcindonesia.com, 2019. Pada tahun 2019 keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan juga terjadi pada PT. Hanson International Tbk, keterlambatan tersebut terjadi dikarenakan sebagian beberapa dokumen dan file masih disita oleh penyidik kejaksaan agung dan bareskrim polri terkait perkara hukum yang terjadi pada direktur utama yaitu Benny Tjokrosaputro pada kasus Jiwasraya yang melakukan korupsi, kasus tersebut diakses oleh peneliti melalui laman www.cnbcindonesia.com, 2020. Kasus lainnya yaitu pada PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA), keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan tahun 2020 disebabkan karena Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan sebagai auditor independen di perusahaan tersebut memberikan opini tidak menyatakan pendapat. Diberikannya opini tidak menyatakan pendapat tersebut karena pada laporan keuangan perusahaan PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA) di masa pandemi covid 19 mengalami difisiensi ekuitas yang sebesar USD 1,9 miliar serta adanya pembatasan perjalanan yang menyebabkan menurunnya perjalanan udara, kasus tersebut diakses oleh peneliti melalui laman www.liputan6.com, 2021.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang meneliti mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi keterlambatan audit atau *audit delay* masih menunjukkan hasil yang inkonsisten. Selain itu, adanya fenomena baru pandemi covid-19 masih belum banyak yang mengkaji penelitian tersebut. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji kembali mengenai faktor yang mempengaruhi *audit delay* dan masa pandemi covid-19. Berdasarkan uraian yang dijelaskan, peneliti melakukan suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor, Aktivitas Persediaan, dan Pandemi Covid-19 terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)”.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Berdasarkan penelitian Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa *Agency Theory* merupakan teori yang mendefinisikan suatu perjanjian yang dilakukan antara satu atau lebih pemilik (prinsipal) dengan agen (pihak manajemen perusahaan). Sebagai agen yang memiliki wewenang dan tanggungjawab terhadap perusahaan dalam pengambilan keputusan harus dapat menyajikan suatu informasi laporan keuangan yang telah diaudit oleh seorang auditor.

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Signaling Theory adalah suatu tindakan manajemen untuk mendapatkan suatu informasi perusahaan secara menyeluruh serta akurat dalam internal suatu perusahaan serta pada prospeknya di masa mendatang daripada

pihak investor (Fiatmoko & Anisykurlillah, 2015).

Audit Delay

Berdasarkan penelitian Bugis *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa *Audit delay* atau dikatakan dengan *audit report lag* merupakan faktor yang dapat berdampak pada timeless publikasi laporan keuangan. *Audit delay* atau keterlambatan penyampaian audit adalah rentang waktu seorang auditor dalam menyelesaikan auditnya dari tanggal tutup buku hingga tanggal penandatanganan laporan auditor (Nurahmayani *et al.*, 2018).

Opini Audit

Opini auditor adalah suatu simpulan seorang auditor dalam menyelesaikan auditnya terhadap suatu laporan keuangan perusahaan klien atas kewajaran suatu laporan keuangan yang diciptakan oleh manajemen kepada semua situasi yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum (Rustiarini & Sugiarti, 2013).

Pergantian Auditor (Auditor Switching)

Auditor Switching adalah tanggapan mengenai adanya pergantian auditor yang dilakukan kepada perusahaan klien (Priyatna & Pramono, 2015). Pergantian auditor merupakan suatu kondisi dimana terjadi pergantian auditor dari tahun sebelumnya.

Aktivitas Persediaan

Persediaan adalah jumlah barang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang terdiri dari barang jadi, setengah jadi, serta dalam proses untuk diperjualbelikan. Persediaan mempengaruhi kelancaran operasi dan jalannya kegiatan perusahaan secara rutin dalam

memproduksi suatu barang. Berdasarkan penelitian (Hamka, 2020) menyatakan bahwa rasio perputaran persediaan merupakan rasio untuk mengukur berapa kali persediaan yang ada dalam perusahaan berputar selama satu periode.

Pandemi Covid-19

Virus covid-19 atau *severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2)* adalah virus yang dapat mengganggu sistem pernafasan, infeksi pada paru-paru hingga kematian. Virus ini merupakan virus yang sangat berbahaya karena penularan dari virus tersebut sangat cepat.

Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit Delay

Opini audit merupakan suatu kondisi dimana perusahaan membutuhkan suatu pendapat dari auditor apabila terjadi suatu laporan keuangan yang tidak berdasarkan dengan standar keuangan yang telah ditetapkan. Perusahaan yang memperoleh pendapat selain wajar tanpa pengecualian akan membuat perusahaan melakukan diskusi terkait opini yang diberikan oleh auditor, dan auditor harus memperoleh bukti penyebab auditor memberikan opini tersebut. Dengan demikian akan dapat mengakibatkan terjadinya *audit delay* yang semakin lama. Namun, jika perusahaan menerima pendapat wajar tanpa pengecualian, maka perusahaan tidak lagi memerlukan waktu untuk melakukan diskusi kepada auditor. Hal tersebut akan membuat terjadinya *audit delay* lebih pendek. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian Primantara & Rasmini (2015) yang menyatakan bahwa opini

audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan diatas, maka hipotesisnya seperti berikut:

H_1 : Opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Pengaruh Pergantian Auditor terhadap *Audit Delay*

Pergantian auditor adalah kondisi dimana terjadi pergantian auditor dari tahun sebelumnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20/2015 pasal 11 ayat (1) mengenai praktik akuntan publik menjelaskan bahwa kantor akuntan publik (KAP) tidak akan membatasi untuk melakukan pengauditan suatu perusahaan, tetapi pembatasan tersebut hanya bisa terjadi atau berlaku pada akuntan publik yaitu paling lama 5 tahun buku secara berturut-turut. Jika klien memutuskan untuk melakukan pergantian auditor tanpa adanya penjelasan yang jelas tidak berdasarkan aturan tersebut, maka hal ini dapat disebabkan karena ketidakpuasan konsumen kepada pelayanan yang telah diberikan oleh auditor yang sebelumnya. Perusahaan yang melakukan pergantian auditor akan terpantau lama dalam menyelesaikan auditnya, hal tersebut disebabkan karena auditor yang baru akan terlebih dahulu memahami mengenai lingkungan bisnis terhadap klien serta berkomunikasi terhadap auditor yang lama. Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh penelitian Praptika & Rasmini (2016.) yang menunjukkan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif pada *audit delay*. Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesisnya sebagai berikut.

H_2 : Pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Pengaruh Aktivitas Persediaan terhadap *Audit Delay*

Perputaran persediaan merupakan suatu keadaan keluar masuknya sejumlah barang untuk dapat diperjualbelikan. Meningkatnya perputaran persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa operasi penjualan berjalan dengan cepat. Namun, jika perputaran persediannya rendah, maka menunjukkan bahwa adanya keterlambatan penjualan. Perusahaan yang memperoleh rasio perputaran persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu melakukan perputaran persediaannya dengan efektif dan semaksimal mungkin. Dengan demikian pada lingkup audit diambil tidak luas, hal tersebut akan dapat membuat auditor mempercepat melakukan tugasnya dalam mengaudit suatu laporan keuangan. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian Endiana & Apriada (2020) bahwa aktivitas persediaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan diatas, maka hipotesisnya sebagai berikut.

H_3 : Aktivitas persediaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*

Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap *Audit Delay*

Pandemi covid-19 ialah fenomena baru yang terjadi di Indonesia yang dapat memberikan berbagai macam dampak yang ditimbulkan, salah satunya yaitu bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya mengaudit suatu laporan keuangan perusahaan. Untuk dapat

menyelesaikan suatu laporan keuangan tersebut auditor harus dapat mencari suatu bukti audit. Dalam memperoleh suatu bukti audit tersebut auditor harus melakukan observasi secara langsung seperti menghitung persediaan barang pada perusahaan. Namun, adanya pandemi ini membuat auditor harus mencari alternatif lain untuk memperoleh suatu bukti audit tersebut. Hal ini terjadi karena adanya berbagai macam kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut seperti menerapkan adanya pembatasan atau lockdown di berbagai daerah hingga penundaan sejumlah kegiatan yang akan menimbulkan keramaian dan diterapkannya sistem *online* atau *work from home* untuk memotong rantai penyebaran virus covid-19. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian Wijasari & Wirajaya (2021) bahwa pandemi covid 19 berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan diatas, maka hipotesisnya sebagai berikut.

H_4 : Pandemi covid-19 berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

METODE

Objek penelitian yang digunakan yaitu untuk memperoleh bukti empiris pengaruh variabel independen yaitu opini audit, pergantian auditor, aktifitas persediaan, dan pandemi covid-19 terhadap variabel dependen yaitu *audit delay*. Sektor perusahaan yang digunakan oleh peneliti merupakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang menghasilkan jumlah sampel sebanyak 110 sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik yang digunakan untuk

melakukan pengambilan sampel yaitu menggunakan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa studi kepustakaan dan dokumentasi.

Variabel dependen

Audit Delay

Audit delay ialah rentang waktu seorang auditor untuk menyelesaikan auditnya dimulai pada tanggal tutup buku hingga tanggal penandatanganan laporan auditor (Nurahmayani *et al.*, 2018). *Audit delay* diukur dengan tanggal laporan audit dikurangi tanggal laporan keuangan.

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan Keuangan.}$$

Variabel Independen

Opini Audit

Opini audit ialah opini hasil dari seorang auditor dalam menyelesaikan laporan keuangannya serta opini yang ditetapkan atas kewajaran suatu laporan keuangan (Yanthi *et al.*, 2020). Dalam penelitian ini pengukurannya dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion* atau WTP) dan selain pendapat wajar tanpa pengecualian. Penggunaan variabel *dummy* digunakan untuk dapat mengukur variabel opini audit. Jika perusahaan menggunakan jenis opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) diberikan angka 1. Sedangkan pada opini audit selain wajar tanpa pengecualian (WTP), maka akan diberikan angka 0 (Ruchana & Khikmah, 2020).

Pergantian Auditor

Pergantian auditor merupakan suatu kondisi dimana terjadi pergantian auditor dari tahun sebelumnya. Diukur dengan memakai variabel *dummy*. Dalam penelitian ini pengukurannya dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu adanya pergantian auditor dan tidak adanya pergantian auditor. Penggunaan variabel *dummy* digunakan untuk dapat mengukur variabel pergantian auditor. Jika perusahaan selama periode penelitiannya terdapat adanya pergantian auditor maka diberi kode 1. Namun jika tidak adanya pergantian auditor, maka akan diberi kode 0 (Ruchana & Khikmah, 2020).

Aktivitas Persediaan

Perputaran persediaan ialah rasio yang memperlihatkan berapa kali total barang persediaan yang tersedia diganti atau diubah dalam periode 1 tahun. Perputaran persediaan diukur dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata.

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Persediaan Rata-Rata}}$$

Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 merupakan fenomena baru yang terjadi di Indonesia yang dapat memberikan berbagai macam dampak yang ditimbulkan. Penggunaan variabel *dummy* digunakan untuk dapat mengukur variabel pandemi covid-19. Jika pada periode 2020 maka diberi kode 1. Namun jika periode 2016-2019, maka akan diberi kode 0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengobservasi data dalam penelitian ini, maka dilakukan pengujian untuk memastikan data yang dihasilkan akurat. Uji normalitas ditunjukkan hasil uji one sample kolmogorov test menyatakan bahwa nilai *asyp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Berdasarkan nilai tersebut disimpulkan bahwa distribusinya suatu data dapat mengikuti pula pada pola distribusi normal yang dikarenakan nilai *asyp. Sig.* $0,200 > 0,05$. Hasil uji multikolinieritas menyatakan bahwa nilai *tolerance* opini audit sebesar $0,985 \geq 0,10$, pergantian auditor sebesar $0,985 \geq 0,10$, aktivitas persediaan sebesar $0,990 \geq 0,10$, serta pada pandemi covid 19 sebesar $0,996 \geq 0,10$. Selain dapat dilihat melalui nilai *tolerance* dapat dilihat juga dengan nilai *VIF* *audit opinion* sebesar $1,016 \leq 10$, pergantian auditor sebesar $1,015 \geq 10$, aktivitas persediaan sebesar $1,010 \geq 10$, serta pandemi covid 19 sebesar $1,004 \leq 10$. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa tidak adanya multikolinearitas atau dapat dikatakan dengan tidak adanya keterkaitan antar variabel independent.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser menyatakan bahwa pada nilai koefisiensi signifikansi opini audit sebesar 0,244, pergantian auditor sebesar 0,725, aktivitas persediaan sebesar 0,544, serta pandemi covid 19 sebesar 0,524 yang menyatakan bahwa pada masing-masing variabel bebas memiliki nilai koefisiensi signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dapat dilihat melalui nilai *Durbin Watson* yaitu

sebesar 2,187, dengan pembandingan memakai nilai dari signifikansi sebesar 5%, jumlah sampel 110 serta jumlah variabel bebas 4 (k), maka dari penjabaran tersebut setelah melihat tabel Durbin Watson akan mendapat nilai dU sebesar 1.765 serta dL sebesar 1.614. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 2,187 berada diantara dU yaitu sebesar 1.765 serta $4 - dU = 4 - 1.765 = 2,234$ yang artinya bahwa tidak terdapat masalah pada autokorelasi.

Hasil Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 1 mengenai pengujian hasil pengolahan analisis statistik deskriptif menyatakan bahwa terdapat jumlah observasi

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 110 sampel. Hasil analisis uji statistik deskriptif terhadap *audit delay* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 80,3182 serta standar deviasinya yang sebesar 6,33460. Nilai minimum pada variabel *audit delay* yaitu 59 hari yang menyatakan bahwa nilai terendah yang ada pada *audit delay* didapat dari PT. Mandom Indonesia Tbk (TCID) pada periode 2019 serta nilai maksimum pada variabel *audit delay* yaitu 95 hari yang menyatakan bahwa nilai tertinggi yang ada pada *audit delay* diperoleh dari PT. Wisnilak Inti Makmur Tbk (WIIM) pada periode 2020.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Audit Delay</i>	110	59,00	95,00	80,3182	6,33460
Opini Audit	110	0,00	1,00	0,9909	0,09535
Pergantian Auditor	110	0,00	1,00	0,5273	0,50154
Aktivitas Persediaan	110	0,91	26,00	4,6854	3,92740
Pandemi Covid 19	110	0,00	1,00	0,1545	0,36313
Valid N (listwise)	110				

Sumber : data diolah

Hasil analisis uji statistik deskriptif terhadap opini audit memaparkan bahwa nilai minimum pada variabel opini audit sebesar 0,00 yang artinya melakukan selain opini wajar tanpa pengecualian (WTP), nilai maksimum pada variabel opini audit sebesar 1,00 yang artinya melakukan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), nilai *mean* sebesar 0,9909 serta standar deviasi sebesar 0,09535.

Hasil analisis uji statistik deskriptif terhadap pergantian auditor memaparkan bahwa nilai minimum pada variabel pergantian auditor yaitu sebesar 0,00 yang artinya tidak

adanya pergantian auditor, nilai maksimum pada variabel pergantian auditor yaitu sebesar 1,00 yang artinya melakukan pergantian auditor, nilai *mean* sebesar 0,5273 serta standar deviasi sebesar 0,50154.

Hasil analisis uji statistik deskriptif terhadap aktivitas persediaan menunjukkan nilai *mean* sebesar 4,6854 serta standar deviasinya yang sebesar 3,92740. Nilai minimum pada variabel aktivitas persediaan yaitu sebesar 0,91 yang menyatakan bahwa nilai terendah yang ada pada variabel aktivitas persediaan diperoleh dari PT. Delta Djakarta Tbk (DLTA) pada periode 2020 serta nilai

maksimum pada variabel aktivitas persediaan yaitu sebesar 26,00 yang menyatakan bahwa nilai tertinggi yang ada pada variabel aktivitas persediaan diperoleh dari PT. Nippin Indosari Corpindo Tbk (ROTI) pada periode 2016.

Hasil analisis uji statistik deskriptif terhadap pandemi covid 19 memaparkan bahwa nilai minimum pada variabel pandemi covid 19 yaitu sebesar 0,00 yang artinya periode penelitian tahun 2016-2019, nilai maksimum pada variabel pandemi covid 19 yaitu sebesar 1,00 yang artinya periode penelitian tahun 2020, nilai *mean* sebesar 0,1545 serta pada nilai standar deviasi sebesar 0,36313.

Pembahasan

Tabel 2. Hasil Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	85,147	5,459		15,597	0,000
Opini Audit	-4,489	5,425	-0,068	-0,827	0,410
Pergantian Auditor	2,963	1,031	0,235	2,874	0,005
Aktivitas Persediaan	-0,613	0,131	-0,380	-4,668	0,000
Pandemi Covid 19	6,015	1,416	0,345	4,247	0,000

Sumber: Data diolah

Dari hasil analisis data yang telah diteliti menyatakan bahwa dalam melakukan pemberian opini auditor yaitu opini wajar tanpa pengecualian atau selain opini wajar tanpa pengecualian tidak mempengaruhi audit delay dikarenakan auditor melakukan perkerjaannya mengaudit suatu laporan keuangan secara teliti, profesional, serta berhati-hati. Dengan demikian, opini atau pendapat yang auditor berikan yaitu *goodnews* ataupun *badnews* pada hasil kinerja perusahaan bukanlah faktor penentu dalam melakukan pelaporan audit dengan tepat waktu. Oleh karena itu, hal

Berdasarkan Tabel 2 Hasil Output Regresi menunjukkan hasil sebagai berikut:

Pengaruh Opini Audit terhadap *Audit Delay*

Berdasarkan hasil analisis data diatas yang diuji dengan menggunakan variabel dummy menyatakan bahwa H_1 ditolak yang artinya opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Terbuktikannya nilai koefisien signifikansi yang lebih besar daripada tingkat signifikannya yaitu nilai koefisien signifikansi sebesar 0,410 serta tingkat signifikannya sebesar 0,05. Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian Rustiarini & Sugiarti (2013) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

tersebut tidak mempengaruhi pada lamanya waktu atau durasi auditor dalam melakukan pekerjaannya mengaudit suatu laporan keuangan perusahaan.

Pengaruh Pergantian Auditor terhadap *Audit Delay*

Berdasarkan hasil analisis data diatas yang diuji dengan menggunakan variabel dummy menyatakan bahwa H_2 diterima yang artinya pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Terbuktikannya nilai koefisien signifikansi sebesar 0,005 serta tingkat signifikannya sebesar 0,05. Hasil dari

penelitian yang dilakukan sependapat dengan Praptika & Rasmini (2016) yang menyatakan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Dari hasil analisis data yang telah diteliti menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pergantian auditor tentunya akan membutuhkan waktu yang terpantau lama dalam menyelesaikan auditnya dikarenakan auditor yang baru tentunya harus dapat mengenali mengenai kriteria usaha terhadap klien serta sistem yang tersedia. Dengan demikian hal tersebut akan menyita waktu auditor dalam melakukan pekerjaannya mengaudit suatu laporan keuangan yang membuat auditor dalam menyampaikan suatu laporan keuangan yang telah diauditnya menjadi terhambat yang menyebabkan terjadinya audit delay.

Pengaruh Aktivitas Persediaan terhadap *Audit Delay*

Berdasarkan hasil analisis data diatas yang diuji dengan menggunakan perhitungan perputaran persediaan menunjukkan bahwa H_3 diterima yang artinya aktivitas persediaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Terbuktikannya nilai koefisien signifikansi yang lebih kecil daripada tingkat signifikannya yaitu nilai koefisien signifikansi sebesar 0,000 dan tingkat signifikannya sebesar 0,05. Hasil dari penelitian ini sependapat dengan penelitian Endiana & Apriada (2020) yang menyatakan bahwa aktivitas persediaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Dari hasil analisis data yang telah diteliti menyatakan bahwa rasio aktivitas perputaran persediaan yang tinggi dapat menurunkan audit

delay, dikarenakan tingkat tingginya rasio aktivitas perputaran persediaan menunjukkan bahwa operasi penjualan berjalan dengan cepat. Perusahaan yang dapat memaksimalkan manfaat aktivitya menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah dikelola dan dilakukan pengawasan dengan baik. Dengan demikian perusahaan dapat memperoleh hasil yang maksimal dari manfaat ekonomis. Kondisi tersebut menyatakan bahwa perusahaan telah efektif dalam melakukan perputaran persediaannya dengan maksimal, maka pada lingkup audit yang diambil tidak luas, dengan demikian auditor dapat mempercepat tugasnya dalam mengaudit suatu laporan keuangan.

Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap *Audit Delay*

Berdasarkan hasil analisis data diatas yang diuji dengan menggunakan variabel dummy menyatakan bahwa H_4 diterima yang artinya pandemi covid 19 berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Terbuktikannya nilai koefisien signifikansi yang lebih kecil daripada tingkat signifikannya yaitu nilai koefisien signifikansi sebesar 0,000 dan tingkat signifikannya sebesar 0,05. Hasil dari penelitian ini sependapat dengan penelitian Wijasari & Wirajaya (2021) yang menyatakan bahwa pandemi covid 19 berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Dari hasil analisis data yang telah diteliti menyatakan bahwa dalam memperoleh suatu bukti audit tentu seorang auditor harus melakukan observasi secara langsung seperti menghitung persediaan barang. Namun munculnya pandemi ini karena adanya berbagai kebijakan seperti adanya lockdown, *workform home* membuat auditor dalam memperoleh

suatu bukti audit tersebut harus mencari alternatif lain. Hal tersebut membuat auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya mengaudit suatu laporan keuangan menjadi terhambat yang menyebabkan terjadinya *audit delay*.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal tersebut menunjukkan bahwa auditor telah melakukan tugasnya dalam mengaudit suatu laporan keuangan dengan secara profesional. Dengan demikian, opini atau pendapat yang auditor berikan yaitu *goodnews* atau *badnews* pada hasil kinerja perusahaan bukanlah faktor penentu dalam melakukan pelaporan audit dengan tepat waktu.

Pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila terjadinya pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan, maka hal tersebut dapat memperpanjangnya *audit delay*. Dikarenakan auditor yang baru tentunya harus dapat mengenali mengenai kriteria usaha terhadap klien serta sistem yang tersedia. Dengan demikian hal tersebut akan menyita waktu auditor dalam melakukan pekerjaannya mengaudit suatu laporan keuangan.

Aktivitas persediaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tingginya rasio perputaran persediaan maka menunjukkan bahwa operasi penjualan berjalan dengan cepat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu melakukan perputaran persediaan yang efektif dalam melakukan pengawasan. Dengan

demikian pada lingkup audit diambil tidak luas, sehingga auditor dapat mempercepat tugasnya dalam mengaudit suatu laporan keuangan.

Pandemi covid 19 berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pandemi covid 19 membuat pemerintah harus menetapkan berbagai peraturan yang mempengaruhi proses audit dalam melakukan observasi seperti dalam menghitung persediaan yang harusnya dilakukan secara *offline* atau langsung kini harus mencari alternatif lain.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat menambahkan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi *audit delay*, seperti pada ukuran KAP, reputasi auditor, leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas. Selain itu, jenis perusahaan yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini hanya menggunakan jenis perusahaan manufaktur pada sektor barang konsumsi periode 2016-2020 saja, diharapkan juga untuk dapat menambah atau mengganti jenis perusahaan lain dan periode penelitian yang baru. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memperluas hasil penelitian serta menambah pengetahuan tentang *audit delay*.

Bagi perusahaan, diharapkan untuk dapat memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *audit delay*, dikarenakan hal tersebut merupakan bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, apabila terjadinya keterlambatan pasti akan dapat membuat pihak dirugikan.

Bagi auditor, diharapkan untuk dapat melakukan penyelesaian auditnya dengan baik. Hal tersebut dilakukan agar auditor dapat mengeluarkan hasil auditnya sesuai dengan prosedur serta standar auditing yang telah ditetapkan.

Bagi investor, diharapkan untuk sebelum memutuskan investasi pada perusahaan, harus memperhatikan pada kinerja laporan keuangannya terlebih dahulu sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. R., Mardijuwono, A. W., & Habiburrochman, H. (2019). The Effect of Company Characteristics and Auditor Characteristics to Audit Report Lag. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 129–144. <https://doi.org/10.1108/AJAR-05-2019-0042>
- Bugis, F., Maslichah, & Mahsuni, Abdul Wahid. (2021). Audit Delay Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek). *E-Jra*, 10(10), 83–95.
- Endiana, I. D. ., & Apriada, I. . (2020). *Analisis Dampak Internal Yang Mempengaruhi Audit Delay*. 2(2), 82–93.
- Fiatmoko, Arizal Latif, & Anisykurlillah, I. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 1–10.
- Hamka. (2020). Analisis Perputaran Persediaan Pada Pt Japfa Comfeed Indonesia Tbk. *Jurnal Brand*, 2(1), 109–122.
- Jensen, M. ., & Meckling, W. H. (1976). The Theory of the Firm: Managerial Agency Cost and Ownership Structures. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Nurahmayani, I. A., Purnamasari, P., & Oktaroza, M. L. (2018). Pengaruh Penerapan IFRS, Jenis Industri dan Probabilitas Kebangkrutan terhadap Audit Delay (Pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015). *Accruals*, 1(1), 68–81. <https://doi.org/10.35310/accruals.v2i1.7>
- Praaptika, P. Y. H., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh Audit Tenure, Pergantian Auditor dan Financial Distress pada Audit Delay pada Perusahaan Consumer Goods. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 2052–2081.
- Primantara, I. M. D., & Rasmini, N. K. (2015). Pengaruh Jenis Industri, Spesialisasi Industri Auditor, dan Opini Auditor pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 1001–1028.
- Priyatna, G., & Pramono, H. (2015). *Pengaruh Financial Distress, Pergantian Manajemen, Pertumbuhan Perusahaan Dan Opini Audit Terhadap Pergantian Auditor Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013*. Xiii(2), 132–149.
- Ruchana, F., & Khikmah, S. N. (2020). Pengaruh Opini Audit , Pergantian Auditor , Profitabilitas dan Kompleksitas Laporan Keuangan Terhadap Audit Delay. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, Hal. 257-269.
- Rustiarini, N. W., & Sugiarti, N. W. M. (2013). Pengaruh Karakteristik Auditor, Opini Audit, Audit Tenure, Pergantian Auditor Pada Audit Delay. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, July, 657–675.
- Wijasari, L. K. A., & Wirajaya, I. G. A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fenomena Audit Delay di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 168–181.
- Yanthi, K. D. ., Merawati, L. K., & I.A.B., M. (2020). Pengaruh Audit Tenure, Ukuran Kap, Pergantian Auditor, Dan Opini Audit Terhadap Audit Delay Kadek. *Jurnal Kharisma*, 2, 148–158.

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PIUTANG *LEASE*: STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. FIF

Dian Oktaviani¹, Ludwina Harahap^{2*}

^{1,2} Universitas Trilogi, Jakarta 12760, Indonesia

*E-mail: ludyhara@trilogi.ac.id

Diterima 08 November 2022, Disetujui 09 November 2022

Abstrak

Penerapan Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pada piutang dagang yang dijalankan oleh PT. FIF, apakah sudah cukup memadai untuk memitigasi risiko. Pengendalian piutang dagang yang efisien dan efektif dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya memperoleh laba dan kelancaran arus kas. Namun, praktiknya, pengendalian piutang dagang di PT. FIF belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa kelemahan, diantaranya kegiatan pemantauan yang masih kurang efektif, masih adanya rangkap tugas, dan kelemahan lainnya. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif dan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dilakukan selama 3 bulan pada saat awal pandemi Covid 19. Dengan menggunakan kerangka pengendalian internal COSO (2013), peneliti menganalisis praktik pengendalian internal pada PT. FIF. Hasil menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal PT. FIF belum cukup memadai. Lingkungan pengendalian, penilaian resiko sudah berjalan efektif dengan adanya struktur organisasi, ketentuan, dan penerapan SOP terutama pada divisi collection. Aktivitas pengendalian belum cukup berjalan secara efektif, terlihat pada belum adanya pemisahan tugas dan pendokumentasian yang baik. Informasi dan komunikasi sudah berjalan, baik secara top down maupun bottom up. Unsur pengendalian terakhir yaitu aktivitas pemantauan belum berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang kelemahan pengendalian internal dan perkembangan di bidang pengendalian internal. Implikasi praktisnya berupa masukan bagi perusahaan dan entitas bisnis lain untuk memperkuat sistem pengendalian internalnya.

Kata Kunci: COSO framework, Pengendalian Internal, Piutang, lease

Abstract

This study aims to determine the application of the internal control system on trade receivables run by PT. FIF, is it adequate to mitigate risks. Efficient and effective control of accounts receivable can help a company achieve its goals of making a profit and smoothing cash flow. However, in practice, the control of accounts receivable at PT. FIF is not optimal. This can be seen from several weaknesses, including monitoring activities that are still not effective, there are still multiple tasks, and other weaknesses. Research with qualitative descriptive method and data obtained through interviews, observation, and documentation. The research was conducted for 3 months at the start of the Covid 19 pandemic. Using the COSO internal control framework (2013), researchers analyzed internal control practices at PT. FIF. The results show that the implementation of PT. FIF is not sufficient enough. Control environment and risk assessment have been running effectively with the organizational structure, provisions, and implementation of SOP, especially in the collection division. Control activities have not run effectively enough, seen in the absence of segregation of duties and good documentation. Information and communication are already running, both top-down and bottom-up. The last control element, namely monitoring activities, has not gone well. The results of this study are expected to add to the literature on internal control weaknesses and developments in the field of internal control. The practical implication is in the form of input for companies and other business entities to strengthen their internal control systems.

Keywords: Internal Control, Accounts Receivable, lease, COSO framework, weaknesses

PENDAHULUAN

Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba adalah penjualan secara kredit. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang, dan barulah kemudian pada hari jatuh temponya, terjadi aliran kas masuk (*cash in-flow*) yang berasal dari pengumpulan piutang tersebut. Piutang usaha suatu perusahaan pada umumnya merupakan bagian terbesar dari aktiva lancar maupun total aktiva perusahaan. Oleh karena itu pengelolaan dan pengendalian internal terhadap piutang usaha sangat penting diterapkan. Pengendalian internal yang lemah akan menimbulkan banyak kecurigaan dan terjadi kesalahan dan salah menyalahkan.

Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, efisien dan patuh terhadap aturan dan ketentuan akan membantu perusahaan mencapai tujuannya. Pengendalian internal yang efektif juga memberikan keyakinan kepada para shareholders, dan stakeholder laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang berkualitas. Sistem pengendalian internal juga dapat membantu mendeteksi dan mencegah munculnya kecurangan terutama yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan. Sebagai perusahaan leasing di Indonesia, PT. FIF tentunya telah menerapkan sistem pengendalian internal yang dapat membantu agar kegiatan perusahaan efektif, dan efisien. Piutang merupakan asset perusahaan yang harus dikelola dan dipantau secara efektif sehingga dapat membantu perusahaan

mencapai tujuan memperoleh laba dan kelancaran arus kas. Namun sayangnya beberapa perusahaan belum menyadari pentingnya pengendalian internal terhadap piutang.

Implementasi pengendalian internal yang lemah akibat tidak dijalankannya aktivitas monitoring dan pengecekan dapat menjadi penyebab munculnya kecurangan. Faktor lainnya tidak adanya pemisahan fungsi atau tugas dalam suatu perusahaan akan membawa konsekuensi munculnya fraud dan saling lempar tanggung jawab. Faktor-faktor tersebut merupakan temuan dalam penelitian studi kasus ini. Lemahnya kegiatan pengawasan dan pengecekan oleh atasan dapat menimbulkan kecurigaan terjadinya fraud, seperti *cash lapping*. Sejumlah tagihan yang sudah dibayarkan tetapi tidak disetorkan, tidak mencatat pembayaran dari debitur dan mengantongi uangnya, menunda pencatatan piutang, melakukan pembukuan palsu atas mutasi piutang, dan lain sebagainya merupakan bentuk fraud akibat praktek pengendalian internal yang lemah.

PT. FIF merupakan perusahaan pembiayaan kredit, sehingga memiliki piutang dalam jumlah yang cukup besar. Piutang tersebut perlu dikelola dan dipantau secara rutin serta mempraktekkan pengendalian internal mengingat piutang pada perusahaan pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama perusahaan, bilamana tidak dikendalikan dengan baik maka perusahaan mengalami kerugian. Piutang yang diharapkan pada saat jatuh tempo berubah menjadi kas, karena lemahnya aktivitas pengendaliannya

menyebabkan kas yang diharapkan tidak menjadi kenyataan.

Tujuan Penelitian

Perusahaan pembiayaan kredit memiliki piutang dalam jumlah yang cukup besar, sehingga perlu dikelola dan dipantau secara rutin serta mempraktekkan pengendalian internal yang efektif dan efisien mengingat piutang pada perusahaan pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama perusahaan. Kelemahan pengendalian internal dapat menyebabkan kegiatan operasional perusahaan tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Piutang yang diharapkan pada saat jatuh tempo berubah menjadi kas, tidak menjadi kenyataan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek pengendalian internal piutang usaha pada PT. FIF dalam upaya mencegah terjadinya kesalahan prosedural, administratif, dan potensi kecurangan yang mungkin terjadi.

KAJIAN TEORI

Pengendalian Internal

Kelemahan pengendalian internal perusahaan dapat menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak, dan tentunya hal tersebut dapat mengganggu jalannya kegiatan perusahaan. Kerugian yang lebih parah ketika perusahaan tidak dapat beroperasi atau berhenti (bangkrut). Kegagalan mencegah dan mendeteksi penipuan memiliki konsekuensi serius bagi organisasi (Rae & Subramaniam, 2010). Penerapan pengendalian internal yang

baik dapat membantu manajemen atau pemilik usaha memperoleh informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan (Dănescu et al., 2012), dan juga mengenali risiko bisnis yang muncul dari setiap kegiatan perusahaan. Pengambilan risiko merupakan hal mendasar dalam aktivitas bisnis (Spira & Page, 2003), dan risiko bisnis tidak hanya terjadi di perusahaan skala besar saja, usaha kecil pun menghadapi risiko sesuai dengan lingkungan bisnis.

Sikap proaktif terhadap risiko dapat mempengaruhi relevansi, kredibilitas dan komparabilitas informasi, sehingga perlu dikelola secara efisien, menerapkan risiko prospektif dan manajemen yang ketat, serta memiliki strategi, cara, teknik yang memadai dalam menghadapi kejadian-kejadian sesuai dengan faktor risiko dan keadaan (Dănescu et al., 2012). Kualitas dari pengendalian internal mampu memberikan efek keadilan organisasi dan mengurangi fraud (kecurangan) karyawan (Rae & Subramaniam, 2010). Studi yang dilakukan oleh (Rae & Subramaniam, 2010) mengungkapkan beragam aktivitas penipuan seperti penipuan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, pencurian informasi dan penerimaan suap atau penyuaipan. Pelaku utama penipuan adalah karyawan, dan hampir 67 persen dilakukan oleh karyawan tingkat manajemen. Sistem pengendalian manajemen seperti pengendalian internal dianggap dapat mencegah terjadinya fraud. Bahkan kerugian yang diderita oleh perusahaan akibat fraud yang disebabkan lemahnya pengendalian internal sangat besar.

Beberapa studi menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan pengendalian internal dalam meningkatkan nilai perusahaan adalah ukuran perusahaan. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa perusahaan kecil atau mikro sekalipun tidak memerlukan pengendalian internal. Praktek pengendalian internal tentunya disesuaikan antara manfaat dan biaya. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan maka semakin penting untuk diterapkan. Perusahaan kecil, baru berdiri, atau yang memiliki kondisi keuangan lemah, lebih kompleks, sedang berkembang pesat, atau sedang dalam proses restrukturisasi lebih banyak menghadapi masalah pengendalian yang serius. Kelemahan pengendalian internal sangat bervariasi tergantung pada kelemahan material spesifik, hal ini konsisten dengan tantangan yang dihadapi oleh pengendalian internal masing-masing perusahaan (Doyle et al., 2007).

Pengendalian internal adalah suatu proses yang pengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini (COSO, 2013):

- 1) Keandalan pelaporan keuangan
- 2) Efektivitas dan efisiensi operasi
- 3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Tujuan pengendalian internal yaitu untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis akan dicapai; untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi

perusahaan karena kejahatan, bahaya atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyelewengan dan penggelapan; untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi.

Internal Control Integrated Framework (ICIF) tahun 2013 adalah sebagai revisi dari versi tahun 1992. Revisi kerangka kerja pengendalian internal diperlukan untuk menyelaraskan pengendalian internal di seluruh dunia dan untuk membantu organisasi mengelola risiko secara lebih baik dan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Komponen Pengendalian Internal

Menurut COSO dalam *Internal Control-Integrated framework (ICF)* komponen pengendalian intern sebagai berikut (COSO, 2013): *Internal control consist of five integrated components:*

1. *Control Environment*
2. *Risk Assesment*
3. *Control Activities*
4. *Information and Communication*
5. *Monitoring Activities*

Menurut Siti dan Ely (2010:238), mengenai keterbatasan dari pengendalian internal yaitu:

“Sebaik-baiknya desain dan operasi pengendalian intern, pengendalian intern hanya memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan usaha untuk mencapai tujuan pengendalian intern organisasi. Hal tersebut disebabkan karena pengaruh dari keterbatasan

bawaan yang melekat dalam pengendalian intern, yaitu:

- a. Pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah.
- b. Pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang sifatnya manusiawi seperti kekeliruan sederhana.
- c. Adanya kolusi antara personel sehingga pengendalian tidak efektif.
- d. Manajemen yang mengabaikan pengendalian intern.
- e. Biaya pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut.”

Penjualan Kredit

Menurut Astiko dalam Abdurrahman, Hasan (2014:63), menerangkan bahwa: Penjualan kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata “kredit” yang berasal dari Bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari. Pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. (Abdurrahman & Riswaya, 2014). Beberapa pokok bahasan yang dibahas dalam penjualan kredit adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Penjualan Kredit
2. Bagian Yang Terkait Dalam Penjualan Kredit
3. Dokumen-Dokumen yang Digunakan Dalam Penjualan

Piutang Usaha

Menurut Hery, (2015:29) mendefinisikan piutang sebagai “jumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit”. Piutang merupakan hak atau klaim perusahaan terhadap klien atau pelanggan atas barang atau jasa yang telah diberikan atau tagihan atas segala sesuatu hak perusahaan baik berupa uang, barang maupun jasa atas pihak ketiga setelah melaksanakan kewajibannya, sedangkan secara sempit piutang diartikan sebagai tagihan yang hanya dapat diselesaikan dengan diterimanya uang di masa yang akan datang, yang prosesnya dimulai dari pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada pelanggan.

Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Bahwa sewa guna usaha (*leasing*) adalah sebuah perjanjian untuk memperoleh hak menggunakan suatu aktiva berwujud dalam jangka waktu tertentu dengan syarat *lessee* (penyewa) melakukan pembayaran pada *lessor* (pemilik aset atau pihak yang menyewakan). Teknik pembiayaan *leasing* dapat dilihat dari jenis transaksi *leasing* yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori pembiayaan yaitu:

1. *Finance Lease*
Merupakan suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara *lessor* dengan *lessee* dengan pemberian hak opsi kepada *lessee* pada akhir periode *lease*.
2. *Operating Lease Leasing*
Dalam bentuk ini *lessor* sengaja membeli barang modal dan selanjutnya disewakan

kepada lesee. Jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara untuk memperoleh informasi dilakukan kepada Manager dan beberapa karyawan yang bekerja di PT. FIF Kios Manggarai, dan berhubungan dengan aktivitas penjualan kredit dan piutang, serta pengendalian internal. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan dasar kerangka pengendalian internal COSO 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pengendalian internal pada piutang dagang PT. FIF dalam upaya mencegah terjadinya kesalahan prosedural, administratif, dan potensi kecurangan yang mungkin terjadi. Dengan menggunakan kerangka pengendalian internal COSO, yang terdiri dari lima unsur, yaitu 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian resiko, 3) pengendalian aktivitas, 4) informasi dan komunikasi dan 5) monitoring (Pemantauan), berikut hasil analisis praktik pengendalian internal PT. FIF yang didasarkan pada hasil wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen dan studi pustaka.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah pembentukan suasana organisasi serta memberi kesadaran tentang pentingnya pengendalian bagi suatu organisasi. Lingkungan pengendalian terbentuk oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Integritas dan nilai-nilai etika.

Perusahaan memiliki peraturan yang didalamnya terkandung standar etika yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan. Peraturan tersebut dikomunikasikan melalui buku panduan yang dimiliki karyawan pada saat perekrutan, sehingga karyawan diharapkan memiliki integritas dan menerapkan etika dalam melaksanakan pekerjaan. Karyawan memiliki *job description* yang dikomunikasikan melalui kepala divisi dan departemen sehingga seluruh karyawan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dan secara konsisten menjalankan sesuai dengan *job description* masing-masing.

Peraturan perusahaan juga mencakup pedoman terhadap tindakan-tindakan manajemen untuk menghindarkan atau mengurangi dorongan seseorang bertindak tidak jujur, melanggar hukum atau tindakan yang tidak etis.

b. Kewenangan dan tanggung jawab

Wewenang mengalir dari atas ke bawah, berarti bahwa seorang atasan harus menjelaskan dengan jelas bagaimana bawahannya melakukan pekerjaan yang didelegasikan serta menjelaskan apa yang diharapkan dari pendelegasian wewenang tersebut agar dapat menerima hasil kerja

sesuai dengan harapan dan keinginannya. Wewenang harus disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab tanpa wewenang yang memadai dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Kewenangan dan tanggung jawab telah ditetapkan dengan jelas sesuai dengan struktur organisasi perusahaan.

- c. Merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Perusahaan memiliki divisi Human Resources Departement (HRD) yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengurus semua yang berkaitan dengan karyawan mulai dari perekrutan sampai dengan pemutusan kerja. Prosedur perekrutan karyawan sebagai tahap awal perolehan sumber daya telah dimiliki oleh perusahaan dan dilaksanakan. Ketentuan dan aturan terkait dengan mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten juga dimiliki oleh perusahaan dan telah dijalankan.

Secara garis besar, lingkungan pengendalian di PT. FIF telah dikembangkan sebagai dasar dari seluruh komponen sistem pengendalian internal, seperti yang disampaikan oleh Manager PT. FIF.

“PT. FIF memiliki aturan, ketentuan, panduan, juga etika dan budaya kerja yang menjadi pijakan manajemen dan karyawan dalam melakukan aktivitas operasional perusahaan. Ditambah lagi perekrutan karyawan menjadi titik awal bagi perusahaan memperoleh karyawan yang memiliki kompetensi dan integritas”.

Studi terdahulu menunjukkan peran pengendalian internal dalam mencegah terjadinya kecurangan, korupsi, dan bentuk penyelewangan atau kelemahan lainnya. Pengendalian internal yang efektif sangat tergantung pada keberadaan lingkungan pengendaliannya. Lingkungan pengendalian yang efektif tidak terbentuk dengan sendirinya, namun sangat bergantung pada peran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen yang ada dalam suatu perusahaan (human capital). Indikator terwujudnya lingkungan pengendalian yang efektif ditandai dengan terbentuknya budaya perusahaan yang sangat menjunjung integritas, kejujuran, saling percaya.

2. Penilaian Resiko

Penilaian risiko dilakukan secara paralel ketika mendefinisikan tujuan organisasi dan berisi analisis awal tentang bagaimana risiko seharusnya dikelola. Risiko muncul dalam kaitannya dengan tujuan organisasi dan oleh karena itu penetapan tujuan merupakan prasyarat dalam melakukan penilaian risiko. Penentuan risiko merupakan hal yang penting bagi manajemen. Manajemen perusahaan terus berupaya untuk meminimalisir risiko, termasuk risiko kredit yang muncul dari aktivitas pembiayaan kredit atau piutang usaha perusahaan. Manajemen melakukan pengawasan terhadap prosedur kerja *credit marketing officer* (CMO) yang merupakan tonggak awal kelangsungan perusahaan. Perusahaan juga memberlakukan peraturan berupa persentase standar kredit macet untuk konsumen masing-masing CMO, dimana apabila sampai 15% dari jumlah konsumennya

menunggak, maka CMO tersebut wajib melakukan penagihan serta tidak diperbolehkan melakukan survei sampai konsumennya melunasi angsuran, sebagaimana yang tertulis di dalam *Report Aging Schedule* per CMO yang berasal dari *credit analyst* yang terus dimutakhirkan dan diterima CMO setiap hari. Ini akan berpengaruh pada kegiatan penilaian karyawan oleh manajemen. Semakin sering konsumen menunggak, maka *performance* CMO tersebut semakin turun, yang menyebabkan kesempatan untuk menjadi karyawan tetap bagi CMO yang berstatus kontrak semakin kecil, sedangkan untuk CMO yang telah menjadi karyawan tetap, maka kesempatan dalam hal kenaikan jabatan akan semakin kecil.

Demikian juga dengan *account receivable officers (ARO)/collector*. Manajemen telah menetapkan standar bagi ARO dalam melakukan penagihan piutang berupa persentase dari total piutang per debitur masing-masing ARO. Sehingga, apabila standar persentase tersebut tidak tercapai, maka akan berpengaruh bagi kelangsungan kerja ARO tersebut, sebagaimana yang tertulis di dalam *Report Aging Schedule* per ARO yang diberikan oleh *collection head* secara berkesinambungan, yakni sama halnya dengan CMO.

Penilaian risiko telah dilakukan oleh pihak manajemen PT. FIF agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi, diantaranya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penentuan batas tunggakan kredit dan persyaratan memproses

transaksi kredit oleh CMO, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer.

“... tentunya dalam mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan menghadapi berbagai risiko, diantaranya risiko kredit. Risiko yang dihadapi perusahaan sebisa mungkin dihilangkan atau dikelola. Untuk menghindari terjadinya risiko seperti kesalahan, kecurangan, penyelewengan dsbnya, perusahaan telah memiliki ketentuan diantaranya ketentuannya tentang besaran pemberian pagu kredit, batas tunggakan kredit”

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa manajemen mengelola risiko dilakukan dengan tepat. Tindakan manajemen untuk mengelola risiko sebagai titik acuan untuk merancang kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian harus diintegrasikan ke dalam proses agar menjadi efektif dan layak mencapai tujuan tersebut. Aktivitas pengendalian dapat bersifat preventif atau detektif, atau dapat juga manual atau komputerisasi. Aktivitas pengendalian terhadap piutang usaha pada PT. FIF dibagi ke dalam beberapa aktivitas.

- 1) Aktivitas persetujuan kredit (Otorisasi)
- 2) Aktivitas tanggung jawab dan kewenangan
- 3) Aktivitas pemisahan tugas
- 4) Aktivitas pendokumentasian
- 5) Aktivitas penerimaan
- 6) Rekonsiliasi
- 7) Evaluasi Kinerja

Aktivitas pengendalian terhadap piutang usaha pada PT. FIF, diantaranya:

❑ Aktivitas persetujuan kredit (Otorisasi)

Suatu transaksi harus mendapatkan otorisasi yang tepat untuk mendukung pengendalian internal. Setiap transaksi hanya boleh terjadi setelah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Perusahaan dalam mendapatkan calon debitur yang berkualitas merupakan kekuatan dasar bagi manajemen dalam menghasilkan profit, karena semakin banyak jumlah piutang perusahaan maka semakin besar bunga yang akan diperoleh. Aktivitas persetujuan kredit belum berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh manager yang mengatakan masih banyak debitur yang kurang memenuhi syarat yang menyebabkan tingginya tunggakan sehingga dapat menyebabkan jumlah piutang tak tertagih semakin tinggi.

“Tunggakan customer yang belum dibayar masih cukup besar, masih banyak debitur yang tidak bisa membayar tunggakan. Staf yang melakukan analisa kelayakan dalam pemberian kredit belum berjalan seperti yang diharapkan oleh pihak manajemen...”.

Sehubungan dengan hal itu, maka manajemen menetapkan kebijakan sebagai sanksi kepada CMO, yakni berupa apabila sebanyak 15% dari jumlah debiturnya menunggak, maka CMO harus melakukan penagihan dan dilarang melakukan survei sampai debitur tersebut mampu membayar angsuran.

❑ Aktivitas Tanggung Jawab

Pekerjaan yang berkesinambungan antara karyawan satu dengan yang lain, menimbulkan tanggung jawab yang berhubungan pula. Dimana misalnya,

karyawan yang bertugas melakukan penagihan kepada debitur yang menunggak angsuran dan belum maksimal menjalankan tugasnya, sehingga menimbulkan kesan karyawan yang “salah-menyalahkan” dalam tugasnya demi mempertahankan posisinya.

❑ Aktivitas Pemisahan Tugas

Perusahaan belum melakukan pemisahan tugas antara bagian *A/R Admin* dengan penerimaan kas. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya kecurangan, yakni berupa *cash lapping* atau adanya transaksi palsu atau piutang usaha.

❑ Aktivitas Pendokumentasian

Masih terjadi transaksi yang tidak didukung oleh bukti, seperti bukti penerimaan (BP). BP tersebut tidak diserahkan ke bagian *collection* pada hari yang sama, serta belum disediakan lemari khusus untuk penyimpanan dokumen perusahaan serta brankas untuk penyimpanan uang yang belum disetorkan ke bank pada hari itu.

❑ Aktivitas Penerimaan

Perusahaan masih menerimanya uang cash dalam pembayaran angsuran. Selain itu, masih sering terjadi penerimaan kas yang tidak langsung disetorkan ke bank pada hari yang sama, atau selambat-lambatnya 2 x 24 jam. Belum adanya membuat dorongan kepada konsumen untuk melunasi atau melakukan pembayaran dengan transfer ke rekening perusahaan.

❑ Rekonsiliasi

Perusahaan belum rutin melakukan rekapitulasi laporan harian sehingga memungkinkan terjadinya pencurian cash dan cash lapping. Belum adanya pengiriman

pernyataan piutang kepada konsumen minimal 1 bulan sekali sebagai arsip di konsumen itu sendiri.

❑ Evaluasi Kinerja

Perusahaan perlu melakukan evaluasi secara konsisten untuk mengetahui kinerja karyawan serta kesesuaian keadaan dan kondisi perusahaan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan. Namun praktiknya, PT. FIF tidak secara rutin melakukan evaluasi kinerja, atau melakukan rapat rutin tiap bulan untuk mengetahui kinerja divisi atau merespon dan melakukan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi.

Perusahaan juga tidak memberikan pelatihan, promosi/reward, kompensasi dan penghargaan bagi karyawan yang melakukan tugasnya dengan baik. Cuti tahunan karyawan belum dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai bentuk aktivitas pengendalian. Dengan pemberian cuti kepada karyawan maka akan terjadi pen delegasian pekerjaan dan memberikan kesempatan untuk melakukan peninjauan terhadap pekerjaan karyawan yang cuti apakah ada hal-hal yang menyimpang atau kesalahan dalam melakukan pekerjaannya.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi terkait piutang usaha pada PT. FIF adalah berupa informasi yang berasal dari setiap bagian yang membidangi piutang usaha, diantaranya:

- 1) Informasi dari *Debt Collection Staff* (DCS) mengenai kondisi calon debitur maupun debitur

- 2) Informasi dari DCS dan CMO mengenai kondisi penjualan *dealer*

- 3) Data tentang riwayat pembayaran calon debitur kepada pembiayaan (*leasing*) lain.

Informasi-informasi tersebut diolah dan dijadikan sebagai alat pengambil keputusan oleh setiap *section head* dan BM dan dikomunikasikan kepada personil baik secara formal maupun informal. Informasi di atas merupakan contoh informasi eksternal perusahaan, sedangkan informasi internal perusahaan misalnya laporan temuan audit intern yang menyatakan adanya ketidakberesan yang dilakukan oleh CMO berupa merekayasa penghasilan calon debitur menjadi lebih besar, selanjutnya dari informasi ini manajemen langsung mengambil tindakan berupa peringatan, teguran, ataupun pemecatan.

5. Pengawasan atau Pemantauan

Manajemen PT. FIF telah menggariskan tanggung jawab kepada masing-masing personil secara jelas. Kelancaran piutang usaha menjadi tanggung jawab tiap personil yang membidangi piutang usaha. Karena memang antara bagian yang satu dengan bidang lainnya saling berkaitan.

Pemantauan terhadap kelancaran piutang usaha menjadi tanggung jawab *collection head*. *Performance* setiap personil selalu dipantau berdasarkan informasi dari *Report Aging Schedule* periode sebelumnya, sehingga dari hasil pencapaian terhadap pengumpulan piutang usaha dilakukanlah evaluasi dan tindak lanjut.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengendalian internal yang efektif dan efisien menjadi alat bagi manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu pencapaian laba usaha. PT. FIF telah memiliki sistem pengendalian internal, namun implementasi di lapangan ditemukan adanya sedikit perbedaan, yang memunculkan permasalahan. Penulis mencatat beberapa hal untuk menjadi kesimpulan, yaitu secara umum seluruh karyawan dan pimpinan PT. FIF telah berusaha mengimplementasikan sistem pengendalian internal terhadap piutang usaha. Hal ini terlihat mulai dari pembentukan budaya perusahaan melalui kode etik, peraturan, prosedur, mekanisme, struktur organisasi dan proses rekrutmen dan pengembangan karyawan, pemberian tugas dan wewenang, penanaman nilai integritas kepada seluruh karyawan. Menciptakan lingkungan pengendalian melalui budaya perusahaan membantu manajemen mengurangi risiko usaha yang dapat terjadi. Ditambah dengan aktivitas penilaian risiko dan pengelolaan risiko yang dilakukan, seperti menetapkan batas maksimal pemberian kredit, batas tunggakan, aging schedule, kesemuanya bertujuan untuk mengelola risiko usaha yang pasti muncul dalam setiap aktivitas perusahaan. Aktivitas pengendalian yang telah diancang oleh perusahaan berbentuk pengendalian preventif dan detektif, yaitu adanya otorisasi terhadap pemberian persetujuan kredit, pemberian tanggung jawab dan kewenangan, serta pendokumentasian dokumen sudah berjalan seperti yang ditentukan. Namun,

beberapa aktivitas pengendalian yang masih kurang berjalan dengan memadai yaitu belum adanya pemisahan tugas antara orang yang melakukan pencatatan, penagihan atas piutang usaha perusahaan dan penerima kas. Terlebih lagi, pembayaran atau pelunasan piutang usaha bisa dalam bentuk tunai (*cashless*). Kelemahan pengendalian internal ini terlihat sekali pada aktivitas pengendalian. Evaluasi kinerja juga masih dirasakan kurang memadai untuk mencegah terjadinya kesalahan, dan kecurangan. Informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan sudah dijalankan oleh perusahaan secara memadai. Informasi dan komunikasi sudah cukup dimiliki dan dikelola, seperti informasi mengenai kondisi calon debitur maupun debitur, penjualan dealer, riwayat pembayaran calon debitur kepada pembiayaan (leasing) lain. Database yang berisi informasi penting mendukung pengambilan keputusan dan aktivitas monitoring.

Dari berbagai komponen sistem pengendalian internal PT. FIF, penulis menarik kesimpulan bahwa praktek pengendalian internal yang dijalankan masih perlu dikembangkan dan disempurnakan agar dapat mendukung tercapainya kegiatan operasional perusahaan yang efisien dan efektif. Selain itu, pengamanan terhadap aktiva perusahaan dan kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan, baik bersifat internal maupun eksternal.

Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

Pengendalian internal dibangun oleh perusahaan bertujuan agar perusahaan dapat beroperasi secara efektif, efisien dan patuh terhadap ketentuan dan hukum. Hasil penelitian

ini diharapkan menjadi masukan bagi perusahaan mengenai pentingnya menerapkan pengendalian internal secara efektif dan efisien untuk mencegah timbulnya kesalahan dan kecurangan. Peran pimpinan dalam mengimplementasi pengendalian internal sangat besar, seperti air terjun yang turun dari atas ke bawah, pemberian contoh oleh pimpinan dimulai dari atas (pimpinan) dan turun atau mengalir ke bawah. Peran pimpinan dalam memberikan pemahaman pentingnya menerapkan pengendalian internal sangat besar dan efektif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu kemudahan untuk memperoleh informasi dan akses data agak terbatas sehingga pembahasan yang dapat dilakukan belum dapat secara mendalam menganalisa kondisi yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Hasan & Riswaya, A. Ri. (2014). Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti. *Jurnal gComputech & Bisnis*, Vol 8 (No 2), 61–69.
- Agoes, S. (2013). *Cara Mudah Belajar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Basrie, H. (2011). Analisis Pengendalian Intern atas Penjualan dan Penerimaan Kas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- COSO. (2013). *Internal Control - Integrated Framework*. Retrieved.
- Dănescu, T., Prozan, M., & Dănescu, A. C. (2012). The Role of the Risk Management and of the Activities of Internal Control in Supplying useful Information through the Accounting and Fiscal Reports. *Procedia Economics and Finance*, 3(12), 1099–1106. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00280-8](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00280-8)
- Doyle, J., Ge, W., & McVay, S. (2007). Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting. *Journal of Accounting and Economics*, 44(1–2), 193–223. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.10.003>
- Ely Suhayati., & Siti Kurnia Rahayu. (2010). *AUDITING, Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Fariana, M., Lau, E. A., & Suros, A. (2015). Pengendalian Piutang Dagang pada PT. Kokoh Inti Arebama Cabang Samarinda. None.
- Habibie, N. (2013). Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada Pt Adira Finance Cabang Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Hamel, G. (2013). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Piutang Pada PT Nusantara Surya Sakti. 274 *Jurnal EMBA*.
- Hasti, A., & Artiska, C. L. M. C. (2018). Evaluasi Sistem Akuntansi Penjualan Kredit Pada PT. Sekawan Mujur Sejahtera Makassar. *EQUITY: Journal of Economics, Management and Accounting*, 13(2), 84-92.
- Hery. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service). <https://www.academia.edu/38623012/Financia>
- l Accounting IFRS Edition 2e th Jerry J Weygandt
- Maharani, E., & Saifi, M. (2016). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penjualan Kredit Dan Penerimaan Kas Dalam Mendukung Pengendalian Intern Perusahaan (Studi Kasus PT. Smart Tbk Refinery Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 31(1), 16-25.
- Paung, Y. M. (2014). Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan Kredit Rumah pada Perum Perumnas Cabang Kalimantan Timur. *Ekonomia*, 3(3), 206-208
- Rae, K., & Subramaniam, N. (2010). Quality of

- internal control procedures Antecedents and moderating effect on organisational justice and employee fraud. *The Electronic Library*, 34(1), 1–5.
- Spira, L. F., & Page, M. (2003). Risk management: The reinvention of internal control and the changing role of internal audit. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 16(4), 640–661. <https://doi.org/10.1108/09513570310492335>
- Santoso, R. A., & Nur, M. (2012). Pengaruh Perputaran Piutang dan Pengumpulan Piutang Terhadap Likuiditas Perusahaan Pada CV. Bumi Sarana Jaya Di Gresik. *Jurnal Logos*, 6(1), 37-54.
- Singal, C. R., & Tirayoh, V. Z. (2015). ANALISIS PENGENDALIAN INTERNA PIUTANG USAHA PADA DEVELOPER GRAND KAWANUA INTERNATIONAL CITY. *Analisis Pengendalian Internal... Jurnal EMBA*.
- Surupati, D. P. (2013). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Penjualan Dan Penagihan Piutang Pada Pt. Laris Manis Utama Cabang Manado. 422 *Jurnal EMBA*. <https://doi.org/10.1049/piece.1973.0100>
- Tahumang, S., Ilat, V., & Runtu, T. (2017). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG USAHA PADA PT. HASJRAT ABADI TOYOTA CABANG MANADO. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2).
- Wuisan, J. S. (2013). Analisis Efektifitas Pengendalian Intern Piutang Lease Pada PT. Finansia Multi Finance Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).

ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA MENGUNAKAN KONSEP *SHARIAH MAQASHID INDEX*

Mira Munira¹, Shinta Budi Astuti², Ameilia Damayanti^{3*}

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

*Email : amel.damay@gmail.com

Diterima 14 September 2022, Disetujui 07 November 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja berdasarkan konsep Maqashid Syariah dengan menggunakan Nilai SMI (*Shariah Maqashid Index*). Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang disediakan oleh masing-masing sampel Bank Syariah. Seluruh sampel terdiri dari 6 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode lima tahun (2016-2020). Metode analisis dalam penelitian ini adalah Uji Deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peringkat kinerja tertinggi perbankan syariah di Indonesia diraih oleh BTPN Syariah.

Kata Kunci : *Maqashid* Syariah, Kinerja Perbankan, Perbankan Syariah, *Shariah Maqashid Index*, Indonesia

Abstract

This study aimed to analyze the performance based on the concept of Maqashid Syariah using SMI (Shariah Maqashid Index) Value. This study is used data from financial report and annual report which were provided by each Islamic Bank sample. The whole samples is consist of 6 Islamic Banks in Indonesia during five years period (2016-2020). The analytical method in this study is Descriptive Test. Based on the results of the study, it can be concluded that the highest ranking performance of Islamic banking in Indonesia is achieved by BTPN Syariah.

Keywords: *Maqashid* Syariah, Banking Performance, Islamic Banking, *Shariah Maqashid Index*, Indonesia

PENDAHULUAN

Kawasan Asia Tenggara saat ini telah berkembang menjadi salah satu pusat perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di dunia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim menjadi penggerak industri tersebut di kawasan Asia Tenggara bahkan menempati peringkat kedua sebagai negara dengan pertumbuhan keuangan dan perbankan syariah menurut IFCI di tahun 2019. Malaysia yang selama ini menempati peringkat pertama dengan pertumbuhan yang stabil akhirnya dapat dilampaui oleh Indonesia dengan nilai pertumbuhan paling tinggi di IFCI. Pertumbuhan signifikan yang dialami negara Indonesia menurut survey data IFCI (*Islamic Finance Country Index*) salah satunya dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan di sektor perbankan syariah yang semakin membaik. Perbankan syaria'ah mampu memberikan inovasi untuk solusi keuangan khususnya pada masyarakat muslim di dunia yang ingin melakukan transaksi tanpa menghilangkan prinsip syari'ah (Imansari, 2015).

Di Indonesia, perbankan syariah pertama kali muncul pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sendiri juga sempat terimbas krisis moneter pada akhir tahun 90-an yang menyebabkan ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. Kemudian, IDB

memberikan suntikan dana sehingga pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan serta lebih spesifiknya pada Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Presiden Republik Indonesia, 1972).

Bank syariah sebagai lembaga bisnis yang berjalan berdasarkan prinsip syariah tidak boleh diarahkan untuk menghasilkan laba yang maksimum. Sebagai sebuah lembaga bisnis bank syariah harus diarahkan untuk mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Pendirian bank syariah memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian *maqashid* syariah, bank syariah harus memiliki tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan hanya untuk mencapai laba maksimum dan juga harus berusaha untuk mewujudkan *maqashid* syariah (Wahyuni, 2018).

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan pada perbankan karena pengukuran kinerja merupakan gambaran pencapaian prestasi yang telah dilakukan oleh bank dalam kegiatan operasionalnya (Hannan, 2018). Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia maka kinerja perusahaan juga perlu semakin di perhatikan, karena perbankan syariah bukan hanya sebuah perusahaan dengan tujuan *profit oriented* semata namun juga *profit* dan *falah* harus sejalan beriringan agar tujuan syariah dapat tercapai.

Pengukuran kinerja perbankan syari'ah pada saat ini masih mengadopsi pengukuran

kinerja perbankan konvensional. Hal ini terjadi karena tidak ada kajian mengenai tujuan perbankan syari'ah untuk mengukur kinerjanya. Sebagai konsekuensinya, pengukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah mirip dengan pengukuran kinerja perbankan konvensional. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian pengukuran dikarenakan tujuannya yang berbeda, dimana pengukuran perbankan konvensional difokuskan untuk mengukur kondisi keuangan, sedangkan perbankan syari'ah memiliki tujuan lain disamping tujuan keuangan (Syahputra, 2015).

Selama ini pengukuran kinerja perbankan syariah hanya dibatasi pengukuran dari segi *economic performance* atau dari sisi keuangan berdasarkan rasio-rasio keuangan misalnya CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*) dan EVA (*Economic Value Added*). Penilaian kinerja perbankan syariah yang didasarkan pada perhitungan rasio keuangan CAMELS dan EVA memiliki beberapa kelemahan. *Pertama*, dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari penilaian kinerja perbankan akan membuat manajer bertindak mengabaikan rencana jangka panjang. *Kedua*, mengabaikan aspek pengukuran non keuangan dan aset tetap akan memberikan pandangan yang keliru pada manajer bank baik pada masa kini maupun di masa depan. *Ketiga*, kinerja perbankan yang hanya didasarkan kinerja keuangan di masa lalu tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai tujuannya dimasa yang akan datang (Syofyan, 2017).

Perbankan syari'ah memiliki tujuan yang didasari oleh pondasi ekonomi islam. Penilaian tujuan pada bank syari'ah tidak hanya dinilai dari tinggi rendahnya nilai profitabilitas seperti perbankan konvensional, namun juga mempertimbangkan aspek yang seharusnya diperhitungkan dalam penilaian perbankan syari'ah. Aspek tersebut yakni berbentuk sebagai indeks kemanfaatan lembaga keuangan syari'ah (*syari'ah maqashid*) dengan mengukur pertumbuhan lima parameter seperti: *Aql, Dien, Nasl, Nafs* dan *Maal*. Kelima aspek tersebut digolongkan menjadi tiga tujuan utama syari'ah yaitu *Tahzib al-Fardi* (Mendidik Manusia), *Iqamah Al adl* (Menegakkan Keadilan) dan *Jalb Maslahah* (Kepentingan Publik) (Imansari, 2015).

Dalam hal ini penilaian kinerja bank syariah dapat diukur menggunakan konsep *maqashid* syariah. Konsep tersebut merupakan salah satu upaya dalam mengimplementasikan pengukuran kinerja yang khas dan sesuai dengan *maqashid* syariah bagi perbankan syariah. Lebih lanjut, konsep *maqashid* syariah ini dikembangkan dari teori Abu Zahrah bahwa ada tiga tujuan konsep *maqashid* syariah secara lebih luas dan umum yaitu *Tahzib al-Fardi* (Mendidik Manusia), *Iqamah Al adl* (Menegakkan Keadilan) dan *Jalb Maslahah* (Kepentingan Publik) (Devi dan Fitriyah, 2017).

Pengembangan *maqashid* syariah sebagai penilaian kinerja bank syariah telah dilakukan pengujian secara empiris oleh Mohammed dkk., (2008) dalam "*The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*" yang menghasilkan

sebuah konsep pengukuran kinerja keuangan yang disebut *Shariah Maqashid Index* (SMI). Konsep *Shariah Maqashid Indeks* telah di uji dan diverifikasi oleh para ahli dari Timur Tengah dan Malaysia yang ahli di kedua bidang perbankan syariah dan perbankan konvensional melalui beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan dengan wawancara dengan 12 ahli dari bidang perbankan syariah, ahli fiqih, dan ahli ekonomi islam. Tahap kedua yaitu dengan memberikan kuisioner kepada 16 ahli lain yang pada akhirnya sepakat untuk menerima *Shariah Maqashid Index* sebagai konsep yang paling cocok untuk mengukur kinerja perbankan syariah sesuai tujuannya.

Selain *Shariah Maqashid Index*, Kuppusamy, dkk pada 2010 mengembangkan metode lain untuk mengukur kinerja perbankan syariah yaitu metode *Shariah Conformity and Profitability* (SCnP). Metode ini hanya mengembangkan 2 pendekatan atau variable yaitu *Shariah Conformity* dan *Profitability* yang di bagi menjadi 4 rasio kinerja sedangkan *Shariah Maqashid Index* mempunyai ruang lingkup lebih besar dengan mengembangkan 3 variabel menjadi 10 rasio kinerja. Seluruh hasil penelitian yang menggunakan alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan mengukur menggunakan metode konvensional (Prasetyowati dan Handoko, 2016).

Pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan

metode yang sama dengan perbankan konvensional. Hal ini tentu sangat disayangkan karena perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki tujuan dan dasar hukum yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan metode yang sesuai dengan dasar dan tujuan syariah. *Shariah maqashid index* merupakan salah satu metode yang tepat untuk mengukur kinerja perbankan syariah, karena telah mengandung unsur dan tujuan syariah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penelitian ini mengangkat judul **“Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Konsep *Shariah Maqashid Index*”**

KAJIAN TEORI

Bank Syariah

Bank Syariah di dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di definisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl watawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram (Presiden Republik Indonesia, 2008).

Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dijabarkan sebagai berikut

Tabel 1. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam.	Melakukan investasi baik yang halal maupun haram menurut hukum Islam.
Berorientasi keuntungan dan <i>falah</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam).	Berorientasi Keuntungan.
Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa.	Memakai perangkat suku bunga.
Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis.
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur.

Sumber : Imansari (2015)

Prinsip-prinsip Perbankan Syariah

Menurut UU RI No 21 Tahun 2008 pasal 2, Perbankan Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sehingga dalam menjalankan kegiatannya, bank syariah memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Prinsip-prinsip yang dimiliki Bank Syariah berbeda dan lebih ketat dibandingkan dengan prinsip perbankan konvensional (Presiden Republik Indonesia, 2008).

Prinsip-prinsip syariah tersebut menurut Imansari (2015) adalah sebagai berikut :

1. Tidak diperbolehkan untuk mengambil maupun menerima bunga bank.
2. Transaksi keuangan harus bebas dari riba dan secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan transaksi ekonomi dalam bentuk riil. Keuntungan yang diambil dari transaksi hutang maupun perdagangan hutang dipandang dari segi syariah tidak etis.
3. Transaksi keuangan tidak boleh mengeksploitasi salah satu pihak dari pelaku transaksi.
4. Baik pihak pemberi pinjaman maupun peminjam harus saling membagi hasil

keuntungan maupun kerugian yang timbul dari kegiatan yang dilakukan.

5. Melarang aset-aset yang haram.
6. Melarang transaksi yang melibatkan ketidakpastian seperti spekulasi atau perjudian.
7. Setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada asset berwujud maupun sektor-sektor riil yang dapat diidentifikasi.

Kemudian dalam Penjelasan UU RI No 21 Tahun 2008 pasal 2 disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur :

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhil*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
2. *Maisir* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

3. *Gharar* yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
4. Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Bank syariah sebagai badan usaha mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Bank syariah yang berperan sebagai manajer investasi melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip titipan (*wadi'ah yad dhamanah*), bagi hasil (*mudharabah*) atau sewa (*ijarah*). Sedangkan bank syariah sebagai investor melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan oleh bank syariah antara lain dilakukan dengan prinsip pemberian mandate (*wakalah*), bank garansi (*kafalah*), pengalihan utang (*hiwalah*), jaminan utang atau gadai (*rahn*), pinjaman kebajikan untuk dana talangan (*qardh*), jual beli valuta asing (*sharf*), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*.

Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial.

Kegiatan bank syariah selain berorientasi keuntungan juga berorientasi pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya, bank syariah selalu memperhatikan implikasi sosial yang berasal oleh keputusan-keputusan yang di ambil oleh bank, termasuk dalam pembiayaan. Konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah untuk memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *Qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disamping itu konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan peran penting didalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial (Sukoco, 2017).

Keuntungan (*profit*) bukan merupakan kriteria satu-satunya dalam mengevaluasi kinerja suatu bank syariah karena hal ini harus juga sejalan dengan tujuan-tujuan material dan sosial yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selain memperhatikan kesejahteraan sosial dalam setiap usaha komersial, bank syariah juga melakukan kegiatan sosial melalui berbagai kegiatan, antara lain:

- a) Mempunyai divisi yang menerima dan menyalurkan *zakat, infaq, dan sadaqah*,
- b) Memberikan pinjaman kebajikan tanpa bunga (*qardhul hasan*),
- c) Menyisihkan sebagian laba untuk kegiatan sosial, seperti memberikan beasiswa.

Maqashid syari'ah

Maqashid syariah secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan al-syariah. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan sedangkan al-syariah berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Al Ghifari dkk., 2015). Secara terminologi *Maqashid* syariah adalah Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah sebagai upaya dasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan (Rosyidah dkk., 2018).

Agar tujuan syariah (*maqashid* syariah) dapat tercapai maka manusia harus mentaati dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pencapaian tujuan syariah tersebut diantaranya adalah memelihara agama (*Hifdz Ad-Din*), memelihara jiwa (*Hifdz An-Nafs*), memelihara akal (*Hifdz Al'Aql*), memelihara keturunan (*Hifdz An-Nasb*) dan memelihara harta (*Hifdz Al-Maal*) (Cakhyaneu, 2018). Tujuan tersebut harus diterapkan dan dicapai untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Semua aspek dalam kehidupan individu muslim harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan seperti yang dikehendaki oleh *maqashid* syariah (Liliani, 2018).

Maqashid Syariah didasarkan pada manfaat untuk individu dan komunitasnya. Hukum didalamnya didesain untuk melindungi semua manfaat, serta fasilitas yang memajukan kehidupan manusia di muka bumi. Konsep *Maqashid* syariah penting untuk diimplementasikan agar dapat menjadi pengawal bagi setiap transaksi ekonomi dan

keuangan agar bisa mengikuti perkembangan zaman namun sekaligus tidak lepas dari prinsip dasar syariat (Pratama, 2017). *Maqashid* Syariah atau tujuan syariah merupakan bukti aspek integral dari hukum syariah dan merupakan kunci dari dewan pengawasan syariah pada lembaga keuangan (Hurayra, 2015).

Menurut Abu Zahrah (dalam KhoSMIyah, 2019) mengklasifikasikan bahwa hukum-hukum dalam syariah islam ada tiga yaitu sebagai berikut:

1. *Tahdhib al-Fard* (mendidik individu)

Mendidik individu pada setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan malah menjadi sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Membersihkan individu agar menjadi sumber kebajikan bagi kelompok dan masyarakatnya, yaitu dengan tidak menjadi sumber kejahatan bagi mereka. Hal ini bisa diupayakan dengan melakukan ibadah. Yang semua ditujukan untuk membersihkan jiwa dari semua kotoran (penyakit) serta memperkokoh kesetiawanan sosial. Ada empat rasio indikator yang terdapat pada variabel ini yakni Dana Pendidikan atau beasiswa, Penelitian, Pelatihan, dan Publisitas yang dapat diperoleh dari data annual report atau Laporan tahunan tiap Bank Umum Syariah dimasing-masing negara.

2. *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan)

Menegakkan keadilan dalam masyarakat baik menyangkut urusan diantara sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non muslim). Tujuan ditegakkannya keadilan

dalam Islam amatlah luhur. Yang menyangkut dalam berbagai aspek kehidupan yaitu adil di bidang hukum, peradilan dan persaksian serta adil dalam bermuamalah (bergaul) dengan pihak lain, serta usaha untuk mewujudkan keadilan sosial Islam mengharuskan agar dengan cara menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia agar masing-masing orang mendapatkan bagian yang menjadi haknya dengan penuh, tidak dirugikan dan tidak teraniaya. Ada tiga rasio indikator yang terdapat pada variabel ini yakni Fair Return, Fungsi Distribusi, dan Produk Non Bunga yang dapat diperoleh dari data annual report atau laporan tahunan tiap Bank Umum Syariah di masing-masing negara.

3. *Jalb al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan)

Mewujudkan kemaslahatan dalam semua aspek hukum. Semua ketentuan hukum yang telah disyariatkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah pastilah mengandung muatan kemaslahatan hakiki. Meskipun muatan kemaslahatan tersebut tidak nampak dihadapan orang-orang yang terbuati oleh hawa nafsu. Karena kemaslahatan yang dikehendaki islam bukanlah hawa nafsu, akan tetapi kemaslahatan hakiki yang umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus). Ada tiga rasio indikator yang terdapat pada variabel ini yakni Profit Return, Rasio Investasi pada sektor Riil, dan Zakat. Yang dapat diperoleh dari data annual report atau Laporan tahunan tiap Bank Umum Syariah di masing-masing negara.

Shariah Maqashid Index

Shariah Maqashid Index (SMI) merupakan metode pengukuran kinerja perbankan syariah yang dikembangkan oleh Mohammed dkk., (2008). Dalam penelitiannya "*The Performance Measures of Islamic Banking Based on The Maqashid Framework*". Metode pengukuran kinerja ini di dasari karena ketidaksesuaian penggunaan indikator kinerja konvensional di perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena ketidakcocokan antara tujuan mereka, yang seharusnya bersifat multidimensional, dan tolak ukur konvensional yang bersifat unidimensional, dengan focus pada ukuran keuangan (Wahyuni, 2018). Variabel yang digunakan mengadopsi kepada teori *maqashid* syariah Abu Zaharah yaitu *tahdhib al-fard* (mendidik individu), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan), *jalb al maslahah* (mencapai kesejahteraan).

Mohammed dan Razak adalah *Associate Professor and Coordinator* di Pusat Ekonomi Islam dalam Departemen Ekonomi, Kulliyah Ilmu Ekonomi dan Manajemen, Universitas Islam Internasional Malaysia (IIUM). Mohammed dkk, menggunakan metode Sekaran secara operasional untuk menentukan tujuan perbankan islam menjadi rasio yang dapat diukur. Hal ini dilakukan dengan melihat dimensi perilaku yang dilambangkan dengan konsep. Kemudian diterjemahkan ke elemen yang diamati dan terukur sehingga membentuk indeks pengukuran konsep.

Dengan menggunakan metode Sekaran, tiga tujuan umum bank islam, yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan mencapai kesejahteraan dapat dijelaskan secara

operasional. Masing-masing tujuan atau konsep ini kemudian diterjemahkan ke dalam karakteristik atau dimensi yang luas dan akhirnya menjadi perilaku atau elemen terukur.

Tiga *maqashid* tersebut dapat diubah menjadi 6 dimensi dan 6 elemen. Sepuluh elemen itu berubah menjadi rasio kinerja.

Tabel 2. Konsep *Maqashid* Syariah

Konsep	Dimensi	Unsur/ Elemen
1. Mendidik Individu	D1. Menambah dan Meningkatkan kemampuan baru	E1. Pelatihan
	D2. Menciptakan Kesadaran Masyarakat akan Keberadaan Bank Syariah	E2. Publisitas
2. Menegakkan Keadilan	D3. Kontrak yang Adil	E3. Pengembalian Yang adil
	D4. Penghapusan Ketidakadilan	E4. Produk Bank non bunga
3. Mencapai Kesejahteraan	D5. Profitabilitas	E5. Rasio Laba
	D6. Investasi pada Sektor Riil yang Vital	E6. Rasio Investasi pada sektor riil

Sumber : Astuti (2018)

METODE

Variabel dan Pengukuran

Pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah kinerja bank syariah berdasarkan konsep *maqashid* syariah. Konsep *Maqashid* Syariah yang digunakan yaitu konsep tujuan syariah dari Abu Zahra. Abu Zahra membagi tujuan syariah menjadi tiga konsep yaitu *Tahfidz al-Fard* (mendidik individu), *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan) dan *Jalb al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan) (Vonza, 2019). Kinerja perbankan syariah merupakan hasil penjumlahan nilai tiga variabel tujuan bank syariah tersebut.

$$IMS = IK(T1) + IK(T2) + IK(T3)$$

Keterangan :

IMS = *Shariah Maqashid Index*

IK(T1) = Total indikator kinerja tujuan mendidik individu

IK(T2) = Total indikator kinerja tujuan menegakkan keadilan

IK(T3) = Total indikator kinerja tujuan mencapai kesejahteraan

Masing-masing tujuan atau konsep ini kemudian diterjemahkan ke dalam karakteristik atau dimensi yang luas dan akhirnya menjadi perilaku atau elemen terukur. Tiga *maqashid* tersebut dapat diubah menjadi 6 dimensi dan 6 elemen. Enam elemen itu berubah menjadi rasio kinerja seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3. Dimensi *Maqashid* Syariah

Konsep	Dimensi	Unsur/ Elemen	Rasio	Sumber
1. Mendidik Individu	D1. Menambah dan Meningkatkan kemampuan baru	E1. Pelatihan	R1. Biaya Pendidikan dan Pelatihan / total biaya	Laporan Tahunan

	D2. Menciptakan Kesadaran Masyarakat akan Keberadaan Bank Syariah	E2. Publisitas	R2. Biaya Publisitas / total biaya	Laporan Tahunan
2. Menegakkan Keadilan	D3. Kontrak yang Adil	E3. Pengembalian Yang adil	R3. Laba / total pendapatan	Laporan Tahunan
	D4. Penghapusan Ketidakadilan	E4. Produk Bank non bunga	R4. Pendapatan Non Bunga/total pendapatan	Laporan Tahunan
3. Mencapai Kesejahteraan	D5. Profitabilitas	E5. Rasio Laba	R5. Laba Bersih/total aset	Laporan Tahunan
	D6. Investasi pada Sektor Riil yang Vital	E6. Rasio Investasi pada sektor riil	R6. Investasi pada sektor riil/ total investasi	Laporan Tahunan

Dengan menggunakan metode sekarang, penilaian kinerja perbankan syariah berdasarkan konsep *maqashid* syariah yang

dirumuskan oleh para peneliti muslim dalam Imansari (2015) adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Bobot Rata-Rata Variabel dan Elemen

Konsep	Bobot Variabel Skala (100%)	Unsur/ Elemen	Bobot Elemen Skala (100%)
1. Mendidik Individu	30	E1. Pelatihan	53
		E2. Publisitas	47
		TOTAL	100
2. Menegakkan Keadilan	41	E3. Pengembalian Yang adil	44
		E4. Produk Bank non bunga	56
		TOTAL	100
3. Mencapai Kesejahteraan	29	E5. Rasio Laba	47
		E6. Rasio Investasi pada sektor riil	53
		TOTAL	100

Mendidik Individu

Tujuan pertama mengungkapkan tentang bagaimana seharusnya perbankan syariah menyebarkan pengetahuan dan kemampuan serta menanamkan nilai-nilai yang menunjang pembangunan ruhaniyah (Sukoco, 2017).

Indikator Kinerja (IK) untuk Tujuan pertama sebagai berikut :

$$IK (T1) = W11 \times E11 \times R11 + W11 \times E21 \times R21$$

Atau;

$$W11 (E11 \times R11 + E21 \times R21)$$

Dimana :

T1 = Tujuan pertama dari *maqashid* syariah

W11 = Bobot rata-rata untuk tujuan mendidik individu

E11 = Bobot rata-rata untuk elemen pertama tujuan mendidik individu

E21 = Bobot rata-rata untuk elemen kedua tujuan mendidik individu

R11 = Rasio kinerja untuk elemen pertama tujuan mendidik individu

R21 = Rasio kinerja untuk elemen kedua tujuan mendidik individu

Menegakkan Keadilan

Indikator Kinerja (IK) untuk Tujuan kedua sebagai berikut :

$$IK (T2) = W22 \times E12 \times R12 + W22 \times E22 \times R32$$

Atau;

$$W22 (E12 \times R12 + E22 \times R32)$$

Dimana :

T2 = Tujuan kedua dari *maqashid* syariah

W22 = Bobot rata-rata untuk tujuan menegakkan keadilan

E12 = Bobot rata-rata untuk elemen pertama tujuan menegakkan keadilan

E22 = Bobot rata-rata untuk elemen kedua tujuan menegakkan keadilan

R12 = Rasio kinerja untuk elemen pertama tujuan menegakkan keadilan

R22 = Rasio kinerja untuk elemen kedua tujuan menegakkan keadilan

Mewujudkan Kesejahteraan

Indikator Kinerja (IK) untuk Tujuan ketiga sebagai berikut:

$$IK (T3) = W33 \times E13 \times R13 + W33 \times E23 \times R23$$

atau;

$$W33 (E13 \times R13 + E23 \times R23)$$

Dimana :

T3 = Tujuan ketiga dari *maqashid* syariah

W33 = Bobot rata-rata untuk tujuan mencapai kesejahteraan

E13 = Bobot rata-rata untuk elemen pertama tujuan mencapai kesejahteraan

E23 = Bobot rata-rata untuk elemen kedua tujuan mencapai kesejahteraan

R13 = Rasio kinerja untuk elemen pertama tujuan mencapai kesejahteraan

R23 = Rasio kinerja untuk elemen kedua tujuan mencapai kesejahteraan

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Wahyuni, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode tahun 2016-2020.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposing sampling*. *Purposing sampling* yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu (Sari, 2016). Adapun pertimbangan dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perbankan syariah yang telah berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
- b. Telah beroperasi minimal awal tahun 2016
- c. Bank Umum Syariah yang telah mempublikasikan laporan tahunannya secara konsisten selama periode 2016-2020.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs resmi masing-masing bank syariah. Sedangkan metode studi pustaka dilakukan sebagai pedoman dasar dalam menggunakan literatur, jurnal dan sumber pustaka untuk penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighted*. Metode ini digunakan untuk melihat

seberapa besar pencapaian indeks *maqashid* dengan melakukan penjumlahan masing-masing rasio yang memiliki bobot nilai tertentu yang telah ditentukan oleh pakar syariah di dunia (Imansari, 2015). Setelah melakukan penghitungan nilai *maqashid* akan dilakukan analisis statistik deskriptif.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai karakteristik – karakteristik dari suatu kelompok data. Tujuan dari pada uji statistik deskripsi ini adalah untuk menggabungkan dan memberikan penjelasan – penjelasan sederhana mengenai variable – variable penelitian, seperti jumlah variable – variable penelitian, nilai maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi dari masing – masing variable yang akan diteliti (Ghozali, 2016:19).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai total, nilai rata-rata (mean), standar deviasi dan variance data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini akan digambarkan karakteristik *Shariah Maqashid Index* bank syariah dua negara yang menjadi objek penelitian. Hasil uji statistic deskriptif disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SMI Bank Syariah Indonesia	6	,2996	,3921	,3524	,0325
Valid N (listwise)	6				

Sumber : Data Sekunder yang diolah melalui SPSS 25

Pada penelitian ini, untuk bank syariah Indonesia terdiri atas 6 bank syariah dimana rata-rata SMI mencapai 0,3524 dengan standart deviasi 0,0325. Nilai SMI minimum pada kelompok ini sebesar 0,2996 dengan nilai maksimum mencapai 0,3921. Itu artinya nilai SMI bank syariah Indonesia tertinggi pada periode penelitian tahun 2016-2020 yaitu pada BTPN Syariah sebesar 0,3921 sedangkan nilai SMI terendah yaitu pada Bank Muamalat Indonesia sebesar 0,2996.

Pembahasan

Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Shariah Maqashid Index

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata SMI pada perbankan syariah di Indonesia mencapai 0,3524. BTPNS meraih nilai SMI sebesar 0,3921 dan menjadi bank dengan kinerja paling baik. Hal ini tidak lepas dari indikator kinerja BTPNS pada tujuan ketiga *maqashid* yaitu mensejahterakan masyarakat yang mencapai 10,34%. Pada peringkat kedua dengan nilai SMI sebesar 0,3676 yaitu BNIS, kemudian BRIS dan BCAS yang menempati peringkat ketiga dan keempat dengan nilai SMI sebesar 0,3674 dan 0,3565. Sedangkan BSM dan BMI menjadi bank syariah dengan kinerja paling buruk dibandingkan dengan bank syariah yang lainnya dengan hanya mendapat nilai SMI sebesar 0,3312 dan 0,2996.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Perbankan Syarian di Indonesia berdasarkan konsep *Maqashid* Syariah cukup baik, hanya saja ada beberapa perbankan syariah yang tidak mempublikasikan beberapa rasio yang termasuk dalam pengukuran *shariah maqashid index*. Dibandingkan dengan bank syariah Malaysia, bank syariah Indonesia lebih unggul pada nilai tujuan mendidik individu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang pengembangan ilmu akuntansi dan perbankan, khususnya perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai kinerja perbankan syariah dengan konsep *maqashid* syariah. Maka saran yang peneliti dapat berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan, diharapkan untuk mempertimbangkan konsep *maqashid* syariah dalam mengukur
2. Bagi investor, diharapkan dalam pengambilan keputusan dapat mempertimbangan kinerja perusahaan

- dengan konsep *maqashid* syariah didalam menentukan investasi.
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar menambah sample dan tahun pengamatan, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat.
 4. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan seluruh rasio yang terdapat dalam komponen penyusun *sahriah maqashid index* sehingga hasil yang diperoleh lebih valid dan akurat dalam menilai bank syariah dalam memenuhi tujuan syariahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzhani, R. dan Rini, R. 2017. Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Di ASIA Dengan Pendekatan Maqasid Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. 5 (1), 5–30.
- Al Ghifari, M. Handoko, L.H. dan Yani, E.A. 2015. Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 3 (2), 47–66.
- Apriliya, N.L. dan Maslichah, M. 2019. Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Maqashid index dan Sharia Conformity And Profitabilit. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. 8 (03).
- Astuti, S. 2018. Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Indeks Maqshid Syariah dan Profitabilitas Bank Syariah. Tesis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Cakhyaneu, A. 2018. Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan Sharia Maqashid Index (SMI). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 2 (2), 154–163.
- Devi, A.T.L. dan Fitriyah 2017. Komparasi kinerja Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan Maqashid Syariah Index (SMI): Studi kasus pada Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia tahun 2011-2015. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, 8 ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadiyarroyan, M.Z. 2016. Analisis Kinerja Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari Maqasid Syariah dan Intellectual Capital'. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hannan, F.F. 2018. Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja Perusahaan Menggunakan Balanced Scorecard (Studi Kasus: PT Igarar). Skripsi. Universitas Andalas.
- Hurayra, M.A. 2015. Achievement of Maqasid-al-Shariah in islamic banking: An evaluation of Islami bank Bangladesh limited. *Global Journal of Computer Science and Technology*. 15 (1).
- Imansari 2015. Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep Al Maqashid Al- Syariah di Indonesia. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- KhoSMiyah, L.I. 2019. Komparasi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah Index di Indonesia dan Singapura. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Liliani 2018. Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Index'. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mohammed, M.O. Razak, D.A. dan Taib, F.M. 2008. The performance measures of Islamic banking based on the maqasid framework, in: Paper of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) held at Putra Jaya Marroitt. hal. 1–17.

- Oktaviani, L. Nurhasanah, N. dan Bayuni, E.M. 2018. Analisis Penilaian Indeks Maqashid Syariah terhadap Rasio Likuiditas pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*. 4 (1).
- Prasetyowati, L.A. dan Handoko, L.H. 2016. Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity And Profitability (SCNP). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. 4 (2), 107–130.
- Pratama, A.N. 2017. Pengukuran dan Peningkatan Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Index'. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Presiden Republik Indonesia 2008. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Indonesia: .
- Presiden Republik Indonesia 1972. *Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 1972 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*. Indonesia: .
- Ramadhani, R. dan Mutia, E. 2016. Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia dan Malaysia Ditinjau Dari Maqashid Shariah Index. *Simposium nasional akuntansi XIX*. 12 (3).
- Rosyidah, H.H. Syafrida, I. dan Nugroho, H. 2018. Analisis kinerja perbankan syariah berdasarkan maqashid syariah indeks. *account*. 5 (1).
- Safitri, N.I.R. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia dan Singapura Dengan Menggunakan Metode Maqashid Syariah Index. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Saoqi, A.A.Y. 2017. Analyzing the performance of Islamic banking in Indonesia and Malaysia: Maqasid index approach. *Jurnal Ekonomi Islam*. 8 (1), 29–50.
- Sari, F.A. 2016. Pengaruh luas ungkapan sukarela dan asimetri informasi terhadap cost of equity capital pada perusahaan publik di Indonesia.
- Sudrajat, A. dan Sodik, A. 2016. Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015). *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. 4 (1), 178–200.
- Sukoco, B. 2017. Kinerja Bank Umum Syariah Menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah Index (SMI) di Indonesia. Tesis. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Syahputra, M.W. 2015. Analisis kinerja keuangan dan maqasid syari'ah bank umum Syariah di Indonesia periode 2011-2014. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syofyan, A. 2017. Analisis kinerja bank syariah dengan metode indeks maqasid syariah di Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*. 2 (2), 145–158.
- Vonza, B.N. 2019. Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Metode Maqasid Syariah Index Dan Sharia Conformity And Profitability (Scnp). Diss. STIE Perbanas Surabaya.
- Wahyuni, R. 2018. Analisis Kinerja Bank Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah: Pendekatan Shariah Maqashid Index. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KEPATUHAN TERHADAP OPINI AUDIT PEMERINTAH PUSAT DENGAN REKOMENDASI AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Muhammad Yusuf^{1*}, Nita Gustiana²

¹ Institut Teknologi dan Bisnis Bank Rakyat Indonesia, Jakarta, Indonesia

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, Indonesia

*Email : Muhammad.yusuf@bri-institute.ac.id

Diterima 01 November 2022, Disetujui 07 November 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal, kepatuhan dengan variabel *moderating* tindak lanjut rekomendasi terhadap opini audit. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah pusat yang terdapat di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada tahun 2018-2020 dengan 88 pemerintah pusat sampel yang menggunakan metode *sampling design*. Variabel independen penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal dan kepatuhan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Opini Audit. Sementara variabel moderating dalam penelitian ini adalah Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa (1) sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap opini audit. (2) kepatuhan tidak berpengaruh terhadap opini audit. (3) tindak lanjut rekomendasi berpengaruh terhadap opini audit. (4) tindak lanjut rekomendasi audit dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal dan opini audit. (5) tindak lanjut rekomendasi audit tidak dapat memoderasi kepatuhan dan opini audit.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan, Opini Audit, Tindak Lanjut Rekomendasi Audit

Abstract

This study aims to determine the effect of internal control system, compliance with variable moderating follow-up recommendation on audit opinion. The sample used in this study to a central government on the semester examination results overview, inspection report, and follow up recommendation in the 2018-2020 with 88 sample central government using sampling design method. The independent variable is internal control system and compliance. The dependent variable is the audit opinion. While the moderating variable, follow up recommendations. The result of the tests indicated that (1) internal control system has significant effect on audit opinion. (2) compliance has no significant effect on audit opinion. (3) follow-up recommendation has significant effect on audit opinion. (4) follow-up recommendation as a moderating variable able to moderate the effect of internal control system and audit opinion. (5) follow-up recommendation as a moderating variable not able to moderate the effect of compliance on audit opinion..

Keywords : *internal control system, compliance, follow-up recommendation, audit opinion*

PENDAHULUAN

Pemerintah seringkali melakukan berbagai upaya demi menjaga dan meningkatkan kinerja, transparansi, serta akuntabilitas dari keuangan Negara/Daerah salah satunya dengan mencetuskan tiga UU perihal Keuangan Negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, UU No. 01 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

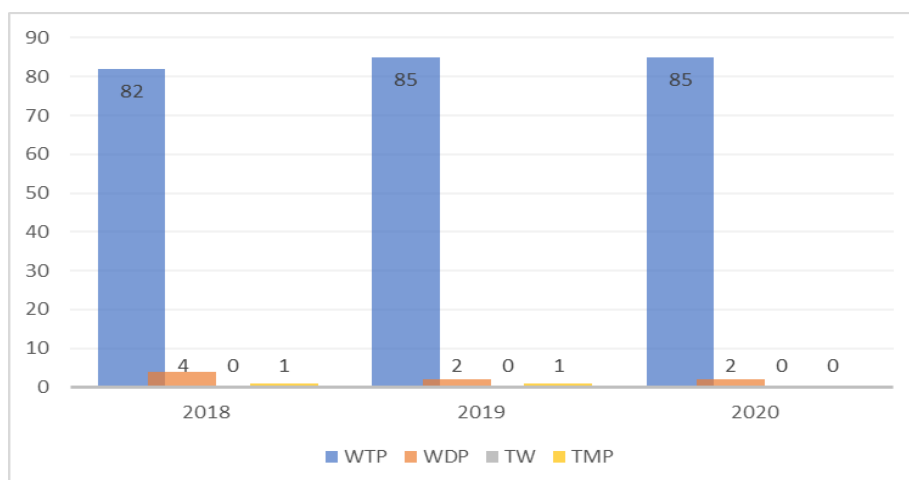
Penerbitan laporan keuangan untuk pertanggung jawaban wajib dilakukan oleh pemerintahan pusat, kabupaten, kota, dan provinsi pada aktivitas yang diselenggarakan. Informasi yang berisi tentang keuangan ialah hasil akhir yang didapatkan dari proses akuntansi dalam hal ini dokumen tersebut berupa suatu laporan.

Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yang berisi Jenis Opini tercantum empat jenis opini dari apa yang diputuskan pemeriksa BPK dalam memeriksa laporan keuangan, yakni opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Sistem pengendalian internal menurut COSO dalam Sujarweni (2015:70) adalah serangkaian tahapan yang menguraikan perihal seluruh proses yang terjadi pada organisasi. Pengendalian internal merupakan proses yang termasuk ke dalam manajemen dasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

BPK dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa laporan keuangan telah berhasil memeriksa 264 objek pemeriksaan. Dari hasil tersebut didapatkan bahwa 252 merupakan opini WTP, 8 termasuk pada opini WDP, dan 2 tergolong pada opini TMP. Adapun penjabaran tersebut telah tertera pada Grafik tersebut:



Gambar 1. Opini LKLL dan LKBUN Tahun 2018-2020

Sumber : Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018-2020 BPK

Selain itu penelitian mengenai SPI terhadap Opini audit telah dilakukan diantaranya penelitian yang merupakan pengembangan dari Syaputra, Hasan, Rasuli (2019), Dalam riset-riset tersebut menghasilkan temuan bahwa SPI mempunyai pengaruh terhadap Opini Audit, sedangkan riset yang dilakukan oleh penelitian Nur Fitriana, Rita Anugerah & Ruhul Fitrioso (2020) memiliki pernyataan yang berbeda. Dalam riset tersebut SPI memiliki pengaruh terhadap pemberian opini WTP pada LKPP secara negatif dan signifikan.

Selain itu ada beberapa penelitian terdahulu mengenai kepatuhan terhadap undang-undang atas opini audit yang diteliti oleh Santi Ananda Putri, Wayan Rai Suarhana, dan Sigit Edi (2018) dan Natama (2021) mengenai Kepatuhan menunjukkan hasil yang berpengaruh terhadap opini audit. Sebaliknya, Mahardika Dwi Putri, Ethika dan Herawati (2018) telah meneliti dengan tema yang sama namun memiliki pernyataan yang berbeda. Dalam penelitian mereka menghasilkan kepatuhan tidak berpengaruh terhadap opini audit.

Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap opini LKPD melalui tindak lanjut rekomendasi audit. Penelitian ini juga menyatakan bahwa Kepatuhan pada perundang-undangan berpengaruh terhadap opini LKPD melalui tindak lanjut rekomendasi audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fitriana menyatakan bahwa Kepatuhan pada perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini LKPD melalui tindak lanjut rekomendasi audit

Masalah dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Opini Audit Pemerintah Pusat dengan Rekomendasi Audit sebagai Variabel Moderasi

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap Opini Audit Pemerintah Pusat, dan merekomendasi Audit mampu memoderasi sistem pengendalian internal, kepatuhan berpengaruh terhadap Opini Audit Pemerintah Pusat.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan

Teori keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar. mementingkan kepentingan diri sendiri.

Opini Audit

Arens (2015) opini audit adalah Pendapat auditor berupa pernyataan tertulis mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material yang didasarkan pada evaluasi bukti audit yang diperoleh dan ditemukan auditor.

Sistem Pengendalian Internal

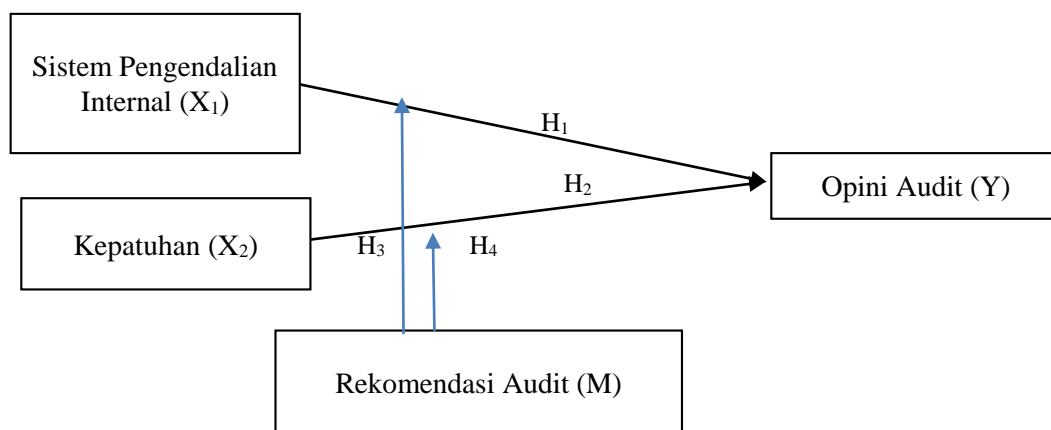
Sistem pengendalian internal adalah sistem yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi,

serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal menurut IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kepatuhan adalah dorongan kepentingan pribadi terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku, yaitu apa yang orang anggap moral dan bertentangan dengan kepentingan

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODELOGI

Variabel Opini Audit

Dalam penelitian ini Opini audit diukur dengan menggunakan proksi skala ordinal di pilih dalam penelitian untuk mengkategorikan berbagai macam opini. Menurut (Ghozali, 2001:4) skala ini juga membuat ranking pada

pribadinya. BPK RI memberikan indikator kepatuhan pada peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut patuh pada ketentuan administrasi, patuh pada perikatan perdata, tidak melakukan penyimpangan yang mengandung unsur pidana (Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (2018).

Tindak Lanjut Rekomendasi Audit

Tindak lanjut audit adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada auditee. Tindak lanjut audit merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan auditee dalam melaksanakan rekomendasi audit.

tiap kategori, tidak hanya mengkategorikan data ke kelompok. Skala ordinal yang diperoleh pada tiap kategori opini yaitu:

1 = Tidak Memberikan Pendapat

2 = Tidak Wajar

3 = Wajar Dengan Pengecualian

4 = Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan

5 = Wajar Tanpa Pengecualian

Variabel Sistem Pengendalian Internal

SPI sebagai salah satu variabel bebas dalam penelitian ini diukur dengan jumlah temuan di masing-masing tahun pemeriksaan terkait kelemahan SPI yang diperoleh dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2018, 2019, dan 2020 BPK RI.

Jumlah temuan tersebut dipisahkan ke dalam tiga kategori yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan kelemahan struktur pengendalian intern.

Variabel Kepatuhan

Variabel kepatuhan diukur dengan menggunakan jumlah temuan di masing-masing tahun pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan dipisahkan ke dalam tujuh kategori yaitu temuan ketidakpatuhan yang menyebabkan kerugian pemerintah pusat, temuan potensi kerugian pemerintah pusat, temuan kekurangan penerimaan, temuan administrasi, temuan mengenai ketidakhematan, temuan mengenai ketidakefisienan, serta temuan mengenai ketidakefektifan.

Variabel Rekomendasi Audit

Tindak Lanjut Rekomendasi Audit. Untuk setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI akan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh orang / badan berwenang untuk mengambil Tindakan, sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 tahun 2017, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi (TLRHP) adalah jumlah tindak

lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sesuai dengan Rekomendasi BPK pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat. Menurut (Arifianti, dkk 2013).

Populasi, Sampel, dan Sampling Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Sampel yang berhasil dikumpulkan sebanyak 264 laporan keuangan dari 88 objek pemeriksaan yaitu pemerintah pusat pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Metode sampel yang digunakan adalah metode area sampling design yang merupakan kluster geografis dalam area pulau Jawa (Sekaran, 2011).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari sumber data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan. Data-data ini dikumpulkan melalui website resmi www.bpk.go.id.

Metode Analisis Data

Teknik analisis kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antar variabel terikat dan variabel bebas. Dalam penelitian ini tipe hubungan antar variabelnya merupakan hubungan kausalitas (hubungan sebab akibat) yaitu menguji pengaruh SPI dan kepatuhan LKPP terhadap opini dengan tindak lanjut rekomendasi audit sebagai variable moderating atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat. Sesuai dengan tujuan penelitian maka digunakan teknik analisis berikut untuk menguji hipotesis secara statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.65502	1.737096	-6.709487	0.0000
X ₁	1.195226	0.316826	3.772499	0.0002
X ₂	0.086295	0.048069	1.795254	0.0744
Z	0.426733	0.068365	6.242004	0.0000
SPI_TLRHPS	-0.041533	0.011105	-3.740023	0.0003
KEPATUHAN_TLRHPS	0.001372	0.001936	0.708527	0.4796

Sumber : Data diolah dengan eviews 10, 2022

Berdasarkan tabel uji t diatas pengaruh variabel SPI (X₁) terhadap variabel Y sebesar $0,0002 < 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $3.772499 > t$ tabel (1.96920), berarti terdapat pengaruh variabel SPI (X₁) terhadap Variabel Y.

Berdasarkan tabel uji t diatas pengaruh variabel Kepatuhan (X₂) terhadap variabel Y sebesar $0,0744 > 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $1.795254 < t$ tabel (1.96920),

Berdasarkan tabel uji t diatas pengaruh variabel SPI_TLRHPS terhadap variabel Y sebesar $0,0003 < 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $3.740023 > t$ tabel (1.96920), diterima yang berarti Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dapat memperkuat hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Audit (Y).

Berdasarkan tabel uji t diatas pengaruh variabel Kepatuhan _TLRHPS terhadap variabel Y sebesar $0,4796 > 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $0.708527 < t$ tabel (1.96920 berarti Tindak Lanjut Rekomendasi Audit tidak dapat memperkuat hubungan kepatuhan terhadap Opini Audit (Y).

Pembahasan

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Audit

Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap Opini Audit. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian koefisien regresi pada variabel Sistem Pengendalian Internal, diperoleh nilai variabel Y sebesar $0,0002 < 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $3.772499 > t$ tabel (1.96920), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Audit. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dimana hasil penelitian tersebut menyatakan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Opini Audit. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh semakin besar kelemahan Sistem Pengendalian Internal yang ditemukan maka akan semakin kecil kemungkinan laporan keuangan pemerintah pusat untuk menerima opini WTP. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dimaksud diantaranya adalah pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, entitas terlambat menyampaikan

laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Pengaruh Kepatuhan terhadap Opini Audit

Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian koefisien regresi pada variabel Kepatuhan, diperoleh variabel Y sebesar $0,0744 > 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $1.795254 < t$ tabel (1.96920), Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Kepatuhan tidak berpengaruh terhadap Opini Audit.

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, Ethika dan Herawati (2018) hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Kepatuhan tidak memiliki pengaruh terhadap Opini Audit. Hal tersebut berarti secara parsial, jumlah temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tidak mempunyai pengaruh terhadap opini audit, adanya pelanggaran yang material atas peraturan perundang-undangan serta ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

Moderasi Rekomendasi dan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan terhadap Opini Audit

Rekomendasi Audit dapat memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Audit. Hasil ini didukung oleh hasil pengujian hipotesis moderasi yang menunjukkan bahwa nilai variabel Y sebesar $0,0003 < 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $3.740023 > t$ tabel (1.96920), sehingga dapat disimpulkan bahwa Tindak Lanjut Rekomendasi Audit t dapat memoderasi

pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Audit.

Hasil ini menunjukkan bahwa Tindak Lanjut Rekomendasi Audit mampu memperkuat hubungan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Audit, yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mahmudi, 2016) dalam Nur Fitriana tahun 2020. Kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh langsung terhadap kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang berimplikasi pada rendahnya penerimaan opini WTP, kualitas laporan keuangan, dengan adanya perbaikan atas kelemahan yang ada dalam rekomendasi audit dapat meningkatkan opini audit yang ditunjukkan dengan semakin berkualitasnya laporan keuangan.

Moderasi Rekomendasi dan Kepatuhan terhadap Opini Audit

Berdasarkan hasil pengolahan data pada bagian sebelumnya peneliti memperoleh hasil bahwa dari 88 jumlah sampel pemerintah pusat Tindak Lanjut Rekomendasi Audit tidak dapat memoderasi pengaruh Kepatuhan terhadap Opini Audit. Hasil ini didukung oleh hasil pengujian hipotesis moderasi yang menunjukkan bahwa variabel Y sebesar $0,4796 > 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $0.708527 < t$ tabel (1.96920), Audit tidak mampu memoderasi pengaruh Kepatuhan terhadap Opini Audit, yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan Fitriana dkk (2020) yang menghasilkan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit tidak mampu memoderasi hubungan antara Kepatuhan dengan Opini Audit. Hal tersebut karena Kepatuhan pada

perundang-undangan tidak langsung berpengaruh terhadap opini tetapi kepatuhan pada perundang-undangan mempengaruhi tindak lanjut atas rekomendasi audit yang berimplikasi pada penerimaan opini LKPP, adanya sistem pengendalian internal yang efektif yang dapat menghindari tindakan kecurangan, pemborosan, dan penyelewengan. Sehingga ada pengaruh yang kuat antara kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dengan penerimaan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap Opini Audit. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh semakin besar kelemahan Sistem Pengendalian Internal yang ditemukan maka akan semakin kecil kemungkinan laporan keuangan pemerintah pusat untuk menerima opini WTP. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dimaksud diantaranya adalah pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

2. Kepatuhan tidak berpengaruh terhadap opini audit, hal tersebut berarti secara parsial, jumlah temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tidak mempunyai pengaruh terhadap opini audit.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit dapat mampu memperkuat hubungan sistem pengendalian internal dan opini audit, hal tersebut karena kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh langsung terhadap kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang berimplikasi pada rendahnya penerimaan opini WTP.
4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit tidak mampu memperkuat hubungan kepatuhan dan opini audit, hal tersebut karena kepatuhan pada perundang-undangan tidak langsung berpengaruh terhadap opini tetapi kepatuhan pada perundang-undangan mempengaruhi tindak lanjut atas rekomendasi audit yang berimplikasi pada penerimaan opini LKPP.

Saran

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disarankan untuk lebih sering memberikan sosialisasi dalam penyusunan laporan keuangan Daerah, mengingat SDM di daerah, khususnya daerah 3T (Terpencil Terjauh dan tertinggal) masih banyak yang belum memahami tentang Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan pelaporan keuangan..

2. Bagi Pemerintah daerah disarankan agar selalu melakukan system pengendalian Internal secara terstruktur agar dapat Menyusun laporan keuangan lebih akurat dan mengurangi salah saji yang material.
3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menambah alat ukur pada variabel dependen sebagai alat ukur sistem pengendalian intern dan kepatuhan agar diperoleh hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. R. (2015). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Arifianti, Hemin.dkk. 2013. "Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Indonesia". Universitas Sebelas Maret. SNA XVI.
- Ayu Ratna Sari, Herry Winarto. (2020). J (Anggreny Bangsawan, Achdian, Abbas, Ahmad, 2021) *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisna Dwi Payana. Pengaruh Pengendalian Intenal dan Bukti Audit*, 1.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), 2018, penerbit Badan Pemeriksa Keuangan, Indonesia.
- Mahardika Dwi Putri, Ethika dan Herawati, (2018) *Pengaruh Kondisi Keuangan, Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Dan Kepatuhan Perusahaan Pada Hukum Dan Peraturan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern*, Journal Universitas Bung Hatta.
- Nur Fitriana, Rita Anugerah & Ruhul Fitriios. (2020). *Jurnal Akuntansi. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan dan Dana Insentif Daerah*, 2.
- Peraturan BPK Nomor 2 tahun 2017, tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Penerbit BPK RI.
- Shafira Ramadhia Utami, Sulardi. (2019). *Audit. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Rasio Kemandirian terhadap Kepatuhan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 253-263.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sekaran, Uma. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tirtha Syaputra, Amir Hasan, Rasuli (2019), *Pengaruh Pengungkapan Kinerja Keuangan Pemerintah, Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Opini Audit dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagai Variabel Pemoderasi*, *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau*